

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN KARAKTERISTIK  
DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**



SKRIPSI:

Oleh :

Nama : Rani Widyaningrum  
No. Mahasiswa : 17312532

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN KARAKTERISTIK  
DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Rani Widyaningrum

No. Mahasiswa: 17312532

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku. ”

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

Penulis,



(Rani Widyaningrum)

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN KARAKTERISTIK DAERAH  
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Rani Widyaningrum

No. Mahasiswa: 17312532

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14 Oktober 2021

Dosen Pembimbing,



(Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak, CA)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Karakteristik Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Disusun oleh : RANI WIDYANINGRUM

Nomor Mahasiswa : 17312532

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Senin, 08 November 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui  
Dean Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT karena atas karunia, kekuatan, kesabaran, dan keajaiban yang telah di berikan oleh-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa shallawat beriring salam penulis haturkan kepada baginda nabi sekaligus rasul Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya.

Halaman persembahan ini adalah bagian terfavorit bagi penulis karena di sini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dari hati yang paling dalam kepada orang-orang special karena telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan kuliah S1 di fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam Indonesia. Dan rasa terimakasih ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu Rida Ismarni, terimakasih telah melahirkan dan membesarkan Rani dengan sebaik-baiknya dan penuh kasih sayang, terimakasih telah menyayangi dan mencintai Rani begitu tulus, terimakasih telah mengajarkan Rani begitu banyak hal, terimakasih karena selalu ada untuk Rani, terimakasih telah menjadi mama yang selalu mendukung dan menguatkan Rani, dan terimakasih untuk semuanya. Untuk Bapak Ahmad Sahiban, terimakasih telah menjadi papa yang luar biasa hebat, terimakasih telah memilihkan UII sebagai tempat Rani menuntut ilmu, terimakasih atas segala usaha dan upaya yang telah papa berikan demi Rani, dan terimakasih untuk semuanya.

2. Agri Kusumaningrum dan Humam Aulia, terimakasih telah menjadi saudara yang baik, terimakasih atas seluruh ilmu-ilmu yang pernah kalian ber-dua ajarkan kepada Rani, terimakasih telah menjadi warna bagi kehidupan Rani, dan terimakasih telah menjadi teladan yang baik untuk adiknya.
3. Seluruh jajaran Dosen FBE UII terutama Dosen Akuntansi, baik yang pernah mengajar maupun hanya terlibat dalam kegiatan kelembagaan maupun kepanitiaan selama penulis menjadi mahasiswa FBE UII. Terkhusus Ibu Abriyani Puspaningsih selaku pembimbing skripsi, berkat beliau penulis mampu memahami dan mengerti proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir.
4. Seluruh teman-teman di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO FBE UII, baik alumni, demisioner, pengurus dan kader. Terimakasih atas ilmu-ilmu luar biasanya yang mungkin tidak akan didapatkan pada bangku perkuliahan. Terimakasih telah memberikan wadah untuk penulis kurang lebih selama 4 tahun di Yogyakarta. Pengalaman-pengalaman yang penulis dapatkan dari organisasi ini tidak akan pernah terlupakan sampai akhir hayat karena sangat berkesan bagi penulis. Untuk teman-teman semasa kepengurusan 2017 (Sania, Nunung, Yunita, Shofiya, Ninda, devi, Hamdan, Dinul, Avin, Riski, Agung, Avif) terimakasih telah memberikan warna dalam kehidupan berorganisasi penulis. Begitu juga teman-teman di KORKOM UII (imam Israf, Obem, Cahyo, Fahmi, Didit, Apep, Bayu, Sania, Nunung, Yunita, Juniken. Dewi, Dinda) betapa senang dan

beruntungnya penulis bertemu kalian. Terakhir dari penulis untuk keluarga besar di HMI, YAKIN USAHA SAMPAI! PANJANG UMUR PERJUANGAN!.

5. Sania Fikri Ananda, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik untuk penulis. Teman yang selalu bersama dari MABA sampai MAHIR. Terimakasih sudah banyak membantu penulis dalam hal apapun selama di Jogja. Terimakasih sudah menjadi sosok teman, sahabat, dan keluarga untuk penulis. banyak hal telah kita lewati bersama yang nantinya akan kita rindukan dimasa mendatang. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin sampai maut memisahkan.
6. Terakhir untuk Ahmad Mujahidin Pulungan, terimakasih telah menjadi abang, partner, pasangan, bahkan seperti keluarga bagi penulis. terimakasih untuk banyak hal yang telah di berikan kepada penulis, baik ilmu, nasihat, pengalaman, bimbingan, support dan masih banyak lagi sehingga penulis bisa menjadi sosok yang lebih baik dari pada sebelumnya.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan. Tidak lupa juga shalawat beriring salam penulis haturkan kepada nabi sakaligus rassul Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya. Alhamdulillah penulis telah menyusun dengan sebaik-baiknya tugas akhir yang berjudul **PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH** ". Tugas akhir ini disusun penulis guna memenuhi syarat kelulusan Pendidikan Sarjana Srata-1 Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat maupun dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ahmad Sahiban, Ibu Rida Ismarni, kakak Agri Kusumaningrum, dan abang Humam Aulia.
2. Keluarga besar Abuhasa Family, khususnya sepupu penulis yaitu Tari, abang Dimas, dan mbak Findi.
3. Seluruh jajaran birokrat kampus FBE UII. Terutama dosen akuntansi FBE UII yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

4. Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Teman-teman penulis yang berada di satu bangku perkuliahan (teman organisasi, teman kepanitiaan, teman kelas OCB, teman 21++)
6. Seluruh kader HMI MPO UII, khususnya HMI MPO FBE UII dan KORKOM UII.
7. Semua orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Terkhusus untuk orang spesial Ahmad Mujahidin Pulungan dan Sania Fikri Ananda.

Penulis sadar bahwa tugas akhir yang telah disusun dengan sebaik mungkin oleh penulis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca dapat memberikan saran dan kritikan yang membangun.

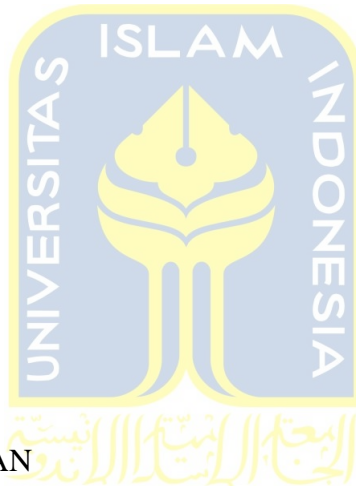
Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Apabila ada kesalahan kata dalam penulisan dan penyebutan, penulis memohon maaf.

Yogyakarta, 13 September 2021

Rani Widyaningrum

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13

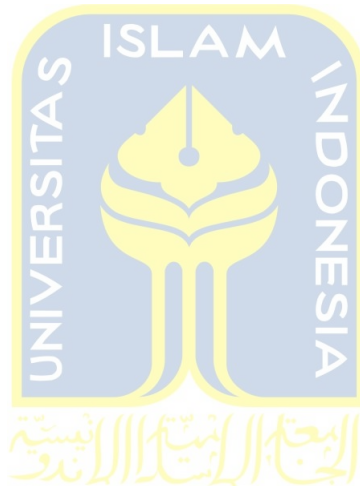


2.1.1	Transparasi dan Akuntabilitas	13
2.1.2	Teori Agensi Pada Pemerintahan	14
2.1.3	Pemeriksaan Keuangan Daerah	15
2.1.4	Badan Pemeriksa Keuangan	15
2.1.5	Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pengungkapan Pada LKPD	18
2.1.6	Karakteristik daerah	20
2.2	Telaah Penelitian Dahulu	20
2.3	Hipotesis Penelitian	28
2.3.1	Opini Audit	29
2.3.2	Temuan audit	29
2.3.3	Karakteristik Daerah	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		32
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.2	Metode Pengumpulan Data	33
3.3	Operasionalisasi Variabel	33
3.3.1	Variabel Dependen	33
3.3.2	Variabel Independen	34
3.3.3	Variabel Kontrol	37
3.4	Metode Analisis Data	39
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	39



3.4.2 Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation)	40
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	40
3.4.4 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	43
3.4.5 Uji Hipotesis	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>45</b>
4.1 Deskripsi Objek	45
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	45
4.3 Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation)	47
4.4 Uji Asumsi Klasik	50
4.4.1 Uji Normalitas Data	50
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity)	51
4.4.3 Uji Multikolinearitas (Multicollinearity)	54
4.4.4 Uji Autokorelasi	54
4.5 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	56
4.6 Uji Hipotesis	57
4.6.1 Uji Kelayakan Model (F)	57
4.6.2 Uji t-statistik (Uji Parsial)	58
4.7 Pengaruh Opini Audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi di Indonesia	59

4.8 Pengaruh Temuan Audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi di Indonesia	60
4.9 Pengaruh karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi di Indonesia	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
5.3 Implikasi	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>66</b>



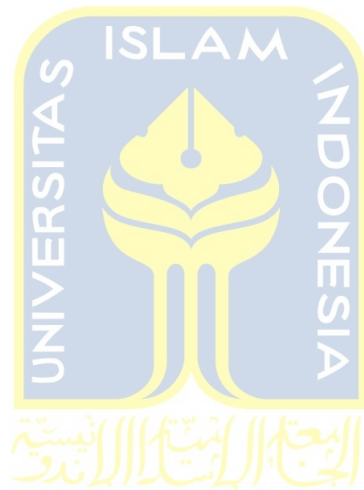
## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Data Variabel	45
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	46
Tabel 4. 3 Analisis Korelasi Antar Variabel	48
Tabel 4. 4 Uji Normalitas Data	50
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi	55
Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi	56
Tabel 4. 9 Uji Kelayakan Model	57
Tabel 4. 10 Uji t-statistik	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	28
Gambar 4. 1	51





## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	68
LAMPIRAN 2	69
LAMPIRAN 3	74
LAMPIRAN 5	76
LAMPIRAN 6	77
LAMPIRAN 7	78



## **ABSTRACT**

*This study aims to determine whether audit opinions, audit findings and regional characteristics affect the level of disclosure in the Financial Statements of Regional Governments in Indonesia. This study uses secondary data originating from the Local Government Financial Reports (LKPD) of 34 provinces in Indonesia from 2016 to 2019. The variables used in this study are audit opinions, audit findings by measuring the level of deviation, and regional characteristics using measurement government wealth and independence ratio. The results of the study indicate that the variables of audit opinion, audit findings, and regional characteristics that use the measurement of government wealth in a province have no effect on the disclosure of LKPD in Indonesia. Meanwhile, the variable of regional characteristics as measured by the independence ratio has an effect on the disclosure of LKPD in Indonesia.*

**Keywords:** *audit opinion, deviation rate, government wealth, independence ratio.*



## **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah opini audit, temuan audit dan karakteristik daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, temuan audit dengan menggunakan pengukuran tingkat penyimpangan, dan karakteristik daerah dengan menggunakan pengukuran kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah yang menggunakan pengukuran kekayaan pemerintah pada suatu provinsi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD di Indonesia. Sedangkan variabel karakteristik daerah yang diukur dengan rasio kemandirian berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD di Indonesia.

**Kata kunci:** opini audit, tingkat penyimpangan, kekayaan pemerintah, rasio kemandirian.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Krisis yang terjadi di Asia Timur menyebar nyaris sebagian negara di dunia. Krisis ini dimulai pada tanggal 2 Juli 1997, di mana Thailand mendeklarasikan bahwa negaranya tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya. Kondisi seperti ini membuat Macan Asia Timur yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan melakukan koreksi mata uang terhadap dollar AS, investasi spekulatif pada real estate, dan menghitung seberapa besar pinjaman atas mata uang asing, hal ini tercantum dalam buku *Manias, Panics and Crashes* yang berjudul *A History of Financial Crises* tahun 2005 karya CP Aliber (Serafica Gischa, Kompas.com, 10 Februari, 2020). Dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 di Indonesia adalah terjadinya perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dari sekian banyak perubahan yang terjadi salah satunya adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berisi sebagai berikut; BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 point 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki

kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan terhadap daerahnya secara akuntabel dan transparan yang diharapkan dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam pengelolaan dana daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP, menyatakan bahwa SAP dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Dalam SAP terdapat pengantar dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Adapun isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

1. SAP Berbasis Akruar
2. SAP Berbasis Kas menuju Akruar
3. Proses Penyusunan SAP Berbasis Akruar sebagai tiga (3) lampiran utama

Dalam PP tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menggambarkan bagaimana perbandingan antara anggaran yang telah disepakati dengan realisasi pada saat periode berjalan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan terhadap SAL terhadap tahun pelaporan.
3. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca. LPK atau Neraca adalah laporan keuangan yang di dalamnya terdapat pencatatan mengenai jumlah aset, utang atau kewajiban, dan aset bersih pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO). LO adalah laporan keuangan yang di dalamnya mencatat informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas.
5. Laporan Arus Kas (LAK). LAK adalah laporan keuangan yang di dalamnya mencatat aliran masuk dan aliran keluar uang pada sebuah perusahaan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE adalah laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atas laba yang ditahan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK adalah catatan tambahan atau informasi tambahan yang terletak pada bagian akhir laporan keuangan, CaLK ini sebagai bentuk informasi lebih lanjut. (Shafira Ramadhia Utami, 2019)

Tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dikatakan masih tergolong rendah. Dalam penelitian (Rahmayanti. 2018) menyatakan bahwa pada periode 2014 – 2016 tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia hanya sebesar 58,09%. Kemudian hasil penelitian dari (Marliani, dkk. 2018) menyatakan bahwa LKPD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 54% pada periode 2014-2017. Dan LKPD provinsi Jawa Timur sebesar 57% pada tahun 2016.

Dewasa ini Pemerintah Daerah di Indonesia telah berhasil meningkatkan kualitas terhadap penyajian laporan keuangan dan hanya sedikit daerah yang belum menyajikan laporan keuangan dengan baik. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa kualitas audit yang diperoleh Pemerintah Daerah di Indonesia sangat memuaskan pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 1. 1 Opini Pemerintah di Indonesia Tahun 2016-2019**

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2016	378	70%	141	26%	0		23	4%	542
2017	411	76%	113	21%	0		18	3%	542
2018	443	82%	86	16%	0		13	2%	542
2019	485	90%	50	9%	0		6	1%	541

*Sumber: Ikhtisar Hasil Pembahasan Semester II Tahun 2019*

Seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Sedangkan pada pemerintahan kabupaten opini Wajar Tanpa Pengecualian dicapai oleh 364 dari 415, dan pemerintahan kota opini Wajar Tanpa Pengecualian 87 dari 93. Tahun 2019 BPK telah memeriksa 541 dari 582 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP), pada semester 1 tahun 2020. Dalam IHPS yang telah disusun, hanya pemerintah kabupaten Waropen dari Provinsi Papua yang belum memberikan laporan keuangannya kepada BPK. Pada semester I tahun 2020, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK mengungkapkan bahwa opini WTP sebanyak 485 LKPD,

opini WDP sebanyak 50 LKPD, dan opini TMP sebanyak 6 LKPD. Di tahun 2019 jumlah opini WTP telah mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2018 LKPD yang mendapatkan opini WTP hanya 82% (*Sumber: SIARAN PERS BPK RI*).

Menurut undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini Audit merupakan pernyataan profesional atas kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan tentang kewajaran suatu asersi atau informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan. Dalam penelitian (Suryaningsih dan Sisdyani, 2016) Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memberikan kinerjanya secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Naopal dkk. 2017) bahwa semakin baik atau bagus opini yang diberikan auditor maka pengungkapan yang dilakukan akan semakin memadai.

Temuan audit adalah sekumpulan data dan informasi terhadap kasus-kasus yang telah diuji dan diolah terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD). Ketika BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan menemukan banyak kejanggalan, maka laporan keuangan tersebut dinyatakan tidak baik. Jika kondisi tersebut terjadi BPK akan segera meminta pemerintah daerah tersebut untuk mengoreksi dan meningkatkan pengungkapan sebagai bentuk perbaikan terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini membuktikan bahwa temuan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik daerah. Seperti yang telah disebutkan oleh (Suhardjanto dan Yulianing tyas. 2011) Karakteristik daerah bersifat khusus atau spesifik sehingga menandai suatu kabupaten atau kota untuk membedakan antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah yang lain. Pernyataan tersebut didukung kembali oleh (A'limatul Muflihatin. 2016) karakteristik daerah merupakan identitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Karakteristik daerah diharapkan bisa menjadi variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik daerah dapat diukur dengan kekayaan pemerintah daerah, di mana hasil hipotesis dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ingram. 1984) kekayaan pemerintah mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pengungkapan laporan keuangan karena kekayaan pemerintah merupakan gambaran bagaimana kualitas manajemen. Dan didukung Kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hilmi dan Martani. 2012) serta (Martani dan Liestiani. 2008) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa kekayaan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, semakin besar kekayaan pemerintah maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan yang lebih.

Selanjutnya, karakteristik daerah dapat diukur juga dengan rasio kemandirian. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum dan Safitri. 2012) serta (Girsang dan Yuyetta. 2015) menyatakan bahwa rasio kemandirian tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada laporan



keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suparno dan Nanda. 2016) serta (Lesmana. 2010) menyatakan bahwa rasio kemandirian mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Di Indonesia pelaksanaan audit untuk sektor publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi satu-satunya lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan pada sektor publik. Yang nantinya penelitian ini akan menggunakan variabel yang berupa opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menghubungkan pengaruh opini audit terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian penulis akan melakukan penelitian terhadap bagaimana pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penulis menambahkan karakteristik daerah yang akan diukur dengan kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah tersedia dalam LKPD tahun 2016-2019.

Peneliti sangat tertarik dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadikan karakteristik daerah sebagai variabel kontrol. Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa karakteristik daerah bisa diukur dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan pada pusat (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengukurannya, di mana peneliti

menggunakan kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian.

Dari beberapa jurnal yang pernah penulis baca, banyak sekali hasil hipotesis yang berbeda-beda dalam meneliti opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang di mana banyaknya ketidakkonsistenan atas hasil penelitian tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan kontribusi untuk menjawab ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis akan menjadikan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode yang pernah dilakukan oleh Liestiani (2008), yang di mana tujuannya adalah untuk melakukan pengujian sensitivitas, yaitu untuk mengetahui apakah hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis sama. Metode ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Evanti Andriani (2012) dengan objek opini audit dan temuan audit terhadap LKPD 2006-2010. Yang membedakan penelitian ini dengan Evanti Andriani (2012) adalah terletak pada penambahan variabelnya, peneliti menambahkan karakteristik daerah dan LKPD yang digunakan adalah tahun 2016-2019.

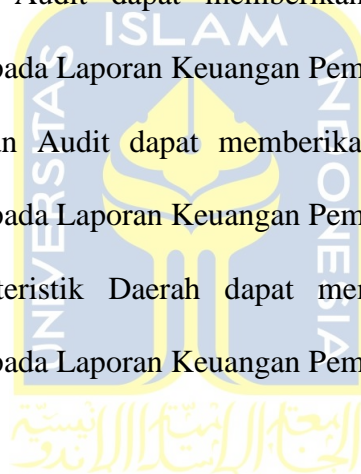
Dengan demikian, penulis ingin melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terkait variabel-variabel yang akan digunakan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian ini

dengan judul **“Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Karakteristik Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut

1. Apakah Opini Audit dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)?
2. Apakah Temuan Audit dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)?
3. Apakah Karakteristik Daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)?



## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis bagaimana pengaruh Opini Audit tahun sebelumnya terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tahun berikutnya.
2. Melakukan analisis bagaimana pengaruh Temuan Audit tahun sebelumnya terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tahun berikutnya.

3. Melakukan analisis bagaimana pengaruh Karakteristik Daerah terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk penulis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan dalam pengujian laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang audit.
3. Masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai media informasi untuk mengetahui seperti apa kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Yang diharapkan masyarakat akan melakukan pengawasan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi, analisis, dan rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan informasi dalam menjalankan tugas pemeriksaan, sehingga dapat mendorong agar tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya agar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan sebagai bahan koreksi terhadap kinerja keuangan pemerintah untuk periode

selanjutnya agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta menyejahterakan rakyat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan sistematika penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Mencakup tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang analisis deskriptif, analisis statistik, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Transparansi dan Akuntabilitas**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atas aktivitas yang telah dilakukan dan keputusan yang diambil. Untuk mendorong agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan *good governance* dalam menjalankan otonomi daerah. Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di mana pasal tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan wajib adanya pengawasan yang dapat menjamin pendistribusian dana tersebut agar direalisasikan secara merata kepada seluruh sektor publik sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana daerah secara transparan dan akuntabel pemerintah daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1.2 Teori Agensi Pada Pemerintahan**

Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yaitu pihak principal dan pihak agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan kewenangan sedangkan pihak agent adalah pihak yang menerima kewenangan (Halim. 2012) Maksud dari pihak prinsipal di sini adalah yang memberikan wewenang kepada pihak agen untuk mengelola suatu kegiatan dan adanya tindakan pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan, yang menjadi pihak prinsipal adalah rakyat sedangkan yang menjadi pihak agent adalah pemerintah, di mana pemerintah akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah harus menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang mengelola. Aktivitas yang dilakukan harus menunjang kepentingan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Sebagai pihak yang memiliki informasi dan wewenang lebih terhadap sumber daya daerah yang dikelola, pejabat pemerintah sering membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa kemudian mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk meminimalisirkan kondisi tersebut, upaya yang harus dilakukan



pemerintah daerah adalah dengan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Dan juga perlu adanya monitoring dari pihak prinsipal dalam mengawasi pihak agen. Bentuk dari monitoring tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dikatakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar adalah dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas terkait informasi yang mereka miliki. Dengan pengungkapan LKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, maka pemerintah telah melaksanakan tugas dan bersedia mempertanggungjawabkan.

### **2.1.3 Pemeriksaan Keuangan Daerah**

Menurut undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara No. 15 Tahun 2004, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan di mana untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

### **2.1.4 Badan Pemeriksa Keuangan**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UUD 1945, BPK

merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Sebagaimana yang telah diamanahkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 ayat (1) tentang Keuangan Negara, yang menjelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib untuk menyampaikan rancangan peraturan daerahnya sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama enam (6) bulan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang membahas mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa BPK dalam melakukan pemeriksaan terdiri atas tiga (3) jenis yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan keuangan adalah untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan juga memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan.

2. Pemeriksaan kinerja

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan kinerja adalah untuk mengukur bagaimana aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah untuk memberikan kesimpulan terhadap hal yang diperiksa. Opini maupun penilaian kinerja tidak boleh disampaikan dalam PDTT.

BPK merupakan lembaga negara yang independen, mandiri, serta profesional yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu bebas dari KKN. Hal ini disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan dilakukannya audit oleh BPK RI adalah untuk memberikan pernyataan profesional atau memberikan opini atas pemeriksaan yang telah dilakukan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Empat (4) kriteria yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan opini yaitu:

1. Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Efektivitas pada SPI
3. Kepatuhan atas peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini
4. Kecukupan dalam pengungkapan

BPK RI dalam melakukan pemeriksaan sangat menekankan pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung saldo akun dalam neraca, pengujian transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK). Sebenarnya tujuan dari BPK RI dalam melakukan audit bukan untuk mencari kesalahan atau penyimpangan akan tetapi BPK RI berkewajiban untuk mengungkapkan jika hasil dari pengujian audit tersebut ditemukan penyimpangan.

## **2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pengungkapan Pada LKPD**

### **2.1.5.1 Opini Audit**

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 11 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dan BPK sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Opini audit memiliki empat (4) macam jenis, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Opini Tidak Wajar (TW)
4. Opini Tidak memberikan pendapat (TMP)

Dalam memberikan opini audit terhadap laporan keuangan BPK memiliki kriteria yaitu, penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi terhadap keefektifan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

### **2.1.5.2 Temuan Audit**

Temuan audit merupakan hasil dari evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria audit (sumber: 2019 Belumlama.com - All

Right Reserved). Indikasi dari temuan audit adalah, baik dan sesuai ataupun ketidaksesuaian berdasarkan kriteria audit. Jika terindikasi bahwa temuan audit tersebut dinyatakan tidak sesuai maka akan diberikan untuk melakukan perbaikan. Adapun maksud dari ketidaksesuaian adalah ditemukannya penyimpangan dari bukti objektif berdasarkan kriteria audit yang telah ditetapkan oleh auditor. Untuk itu jika hal ini terjadi maka harus segera diinvestigasi agar bisa mengetahui kriteria audit apa yang dilanggar dan membuat rekomendasi tindakan untuk perbaikan.

BPK RI melakukan audit bertujuan untuk menguji dan mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Jika BPK RI menemukan penyimpangan setelah melakukan audit maka wajib untuk mengungkapkannya sebagai temuan audit tersebut. Salah saji biasanya disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya penyimpangan-penyimpangan lainnya. Adanya salah saji dapat mempengaruhi informasi terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu perlu adanya rancangan untuk melakukan pemeriksaan agar bisa mendeteksi secara maksimal.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD pada semester I tahun 2020 mengungkapkan adanya 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Hal ini mengakibatkan entitas harus melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah dan bisa juga dalam bentuk aset dengan nilai Rp. 285,79 miliar (*sumber: BPK RI 2020*).

### **2.1.6 Karakteristik daerah**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus, atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011) menyatakan bahwa karakteristik daerah adalah karakteristik khusus atau spesifik yang melekat pada suatu daerah dan pemerintahannya. Karakteristik dari suatu daerah dapat memberikan gambaran atas perbedaan antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah yang lain.

Karakteristik daerah diharapkan bisa menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik daerah dapat digunakan sebagai gambaran terhadap kepatuhan pemerintah atau tingkat ketaatan dalam pengungkapan informasi pada laporan keuangan yang bersifat wajib.

Oleh karena itu karakteristik daerah bisa digunakan untuk memprediksi tingkat ketaatan atau kepatuhan pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi yang sifatnya wajib disampaikan pada laporan keuangan.

## **2.2 Telaah Penelitian Dahulu**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan teori pada penelitian ini. Berikut adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis

dengan penelitian yang sedang dilakukan.

**Tabel 2. 1 Review Kajian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penelitian Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Objek Dan Tempat Kajian</b>	<b>Temuan Kajian</b>
1.	Sulardi , Shafira Ramadhia Utami (2019)	Pengaruh Karakteristik Daerah, Opini Audit, Dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia pada tahun 2017 yang memenuhi kriteria.	Hasil analisis pada 458 pemda menunjukkan rerata pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 60,42%. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan variabel populasi dan IPM berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel opini audit dan rasio kemandirian daerah

				tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemda.
2.	Sari, Adelia Pramita Sari ; Martani, Dewi martini ; Setyaningrum. (2015)	Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	Objek penelitian adalah K/L yang diperiksa oleh BPK	Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, kapasitas sumber daya manusia operator berpengaruh positif terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan.
3.	Andriani, Evanti (2012).	Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2008-2009 2. Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kedua model hanya opini dan nilai temuan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk



			<p>Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK</p> <p>3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota</p>	<p>opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan.</p> <p>Sedangkan untuk nilai temuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan.</p>
4.	<p>Priharjanto, Akhmad ; Wardani, Yusniar Yuliana (2016)</p>	<p>Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik daerah-daerah Terhadap Tingkat</p>	<p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia berdasarkan</p>	<p>Dari 8 (delapan) faktor yang diteliti hanya 2 (dua) yang berpengaruh secara signifikan yaitu opini audit dan jumlah penduduk. Opini audit serta jumlah penduduk</p>

		<p>Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia</p>	<p>Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), opini audit, temuan audit, tingkat penyimpangan audit, serta karakteristik lokal seperti aset regional, tingkat ketergantungan, luas wilayah, penduduk, dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)</p>	<p>berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil tersebut menunjukkan semakin bagus opini audit yang diperoleh maka semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Kemudian Jumlah penduduk juga menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi pengungkapan.</p>
--	--	---	--	--

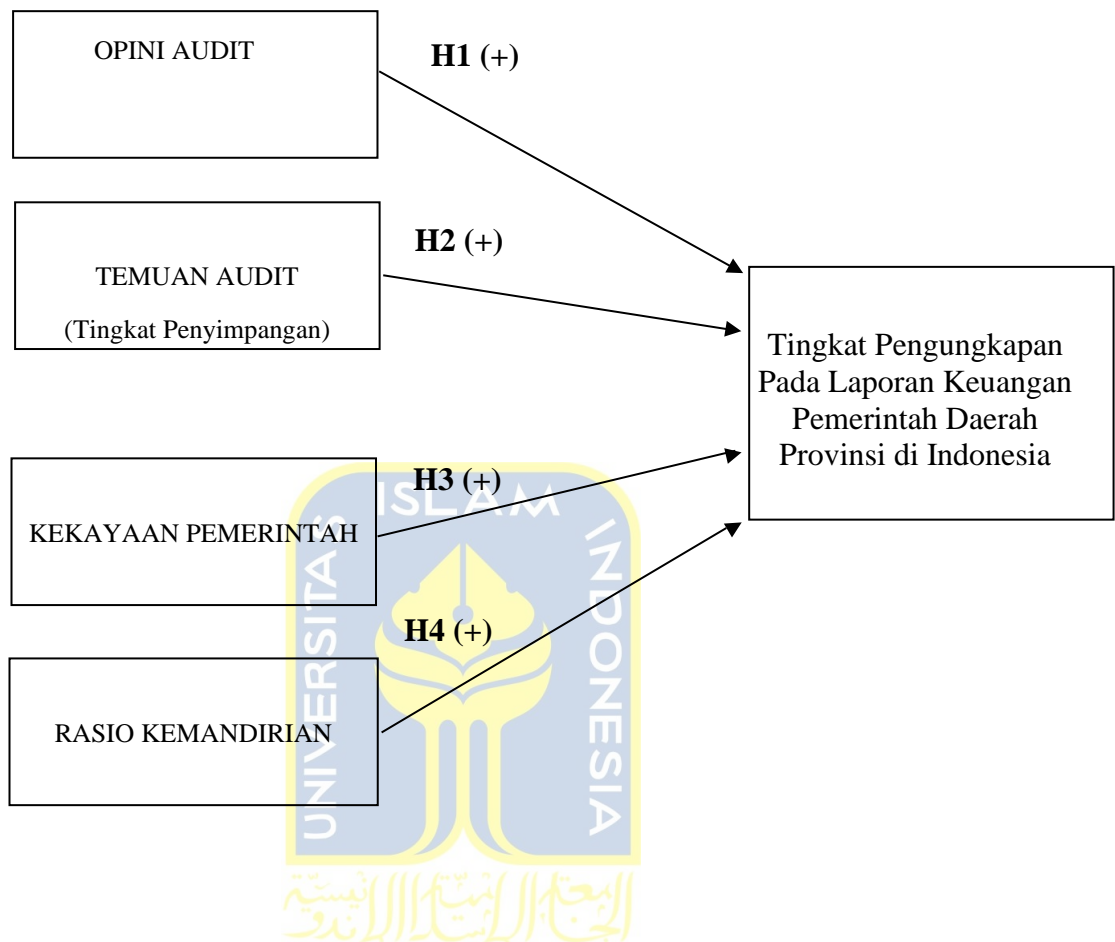


5.	Priharjanto & Wardani (2016)	Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan menggunakan 8 (delapan) faktor yang diteliti.	Opini audit serta jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin bagus opini audit yang diperoleh, maka semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh entitas tersebut.
----	------------------------------	---	--	--

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh opini audit, temuan audit dan karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk temuan audit diukur berdasarkan tingkat penyimpangan, sedangkan karakteristik daerah dibagi menjadi 2 (dua) pengukuran yaitu kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Berikut adalah kerangka penelitian yang digunakan.

**Gambar 2. 1**  
**Faktor Determinan Pengungkapan**



### 2.3.1 Opini Audit

Opini Audit merupakan pernyataan profesional atas kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan tentang kewajaran suatu asersi atau informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan berdasarkan pada empat kriteria yang dijadikan dasar oleh auditor dalam memberikan sebuah opini, yaitu:

1. Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Efektivitas pada SPI
3. Kepatuhan atas peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini

#### 4. Kecukupan dalam pengungkapan

Oleh karena itu opini audit diindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin baik kualitas opini yang diberikan oleh auditor, maka pengungkapan tersebut dikatakan sangat memadai (Naoepal dkk. 2017). Prihardjanto dan Wardani (2016) dan Naopal dkk (2017) menunjukkan bukti bahwa opini atau pendapat audit merupakan determinan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H1 : Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada LKPD.

### 2.3.2 Temuan audit

#### 2.3.2.1 Tingkat Penyimpangan

Tingkat penyimpangan adalah hal-hal apa saja yang memicu kesalahan dalam upaya pengungkapan terhadap laporan keuangan. Penyimpangan bisa terjadi pada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun pada sistem pengendalian intern.

Menurut (Hilmi dan Martani. 2012), tingkat penyimpangan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Sama seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Akhmad Priharjanto dan Yusniar Yuliana Wardani. 2016) jika tingkat penyimpangan audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah besar maka BPK akan meminta pemerintah tersebut untuk menambah pengungkapan dan melakukan koreksi kembali. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengungkapan dan perbaikan atas kualitas laporan keuangan maka akan

mempengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Tingkat penyimpangan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada LKPD

### **2.3.3 Karakteristik Daerah**

#### **2.3.3.1 Kekayaan Pemerintah**

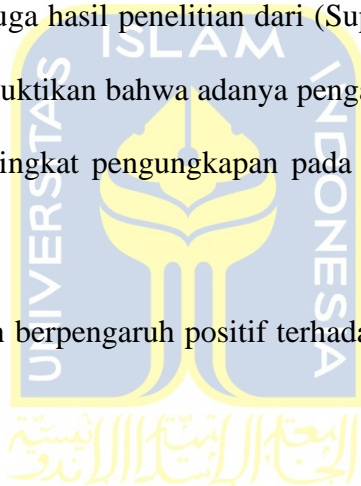
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ingram. 1984) kekayaan daerah memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kekayaan daerah adalah sinyal terhadap kualitas manajemen, sinyal tersebut bagi manajemen dapat memberikan peluang yang besar agar terpilih kembali di periode yang selanjutnya. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Martani dan Liestiani. 2008) serta (Hilmi dan Martani. 2012) mengungkapkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki hal ini mengakibatkan pengungkapan yang lebih, karena sesuai dengan besarnya sumber daya yang dimiliki. Kesimpulan yang didapat dari penelitian sebelumnya adalah bahwa kenaikan kekayaan daerah berarti meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangan.

H3 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada LKDP.

### 2.3.3.2 Rasio Kemandirian

Menurut (Suryantini, Darmayanti, dan Candraninggrat. 2017). Rasio kemandirian adalah tingkat ketergantungan suatu daerah dengan pendanaan eksternal, dan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Penelitian dari (Shafira Ramadhia Utami Sulardi. 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah pula tingkat ketergantungan suatu daerah pada pendanaan eksternal. Dan semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah tergolong tinggi. Dan juga hasil penelitian dari (Suparno, dan Nanda. 2016) serta (Lesmana. 2010) membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

H4 : Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada LKPD.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dari tahun 2016 – 2019 yang di mana laporan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini menggunakan sampel LKPD yang diambil dari tahun 2016 karena di tahun tersebut telah berjalan selama 12 tahun pengimplementasian terhadap standar akuntansi pemerintahan, yang artinya pemerintah telah memahami dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Diharapkan untuk tahun berikutnya pemerintah dapat meningkatkan kualitas dalam menyusun laporan keuangan daerahnya.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu, oleh karena itu kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi di Indonesia dari tahun 2016 - 2019 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. LKPD yang digunakan memiliki ketersediaan data yang menjadi variabel dalam penelitian.



### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data tersebut didapat dari beberapa sumber. Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah dan peneliti mendapatkannya melalui media perantara. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi di Indonesia dari tahun 2016 - 2019 yang telah diaudit, diperoleh dari *website* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan perlu beberapa hari untuk mengumpulkan data tersebut karena adanya proses administrasi dan persetujuan dari pihak BPK. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti opini audit, temuan audit yang menjadi variabel bebas (*independen variabel*), kemudian data kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian sebagai variabel kontrol telah tersedia dalam LKPD tersebut.

### **3.3 Operasionalisasi Variabel**

#### **3.3.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) provinsi di Indonesia. Tingkat pengungkapan pada LKPD provinsi yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah item yang diungkapkan pada LKPD provinsi dengan total pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini.

Metode yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian ini adalah dengan indeks scoring. Indeks scoring adalah pemberian skor terhadap daftar checklist item pengungkapan. Terdapat 34 item pengungkapan yang seharusnya ada dalam CaLK dalam penelitian ini. 34 item pengungkapan tersebut meliputi: informasi umum tentang entitas pelaporan dan akuntansi, kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan. Adapun sistematika pengukuran terhadap tingkat pengungkapan terhadap LKPD provinsi adalah sebagai berikut:

1. Memberi skor terhadap setiap item pengungkapan secara dikotomi, di mana jika suatu item diungkapkan tersedia maka diberi nilai satu, dan jika suatu item diungkapkan tidak tersedia maka diberi nilai nol.
2. Skor yang diberi nilai satu dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
3. Menghitung indeks pengungkapan wajib dengan cara membagi skor total dengan item pengungkapan. Terdapat 34 pengungkapan dalam penelitian ini. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dapat dilihat pada **Lampiran 1 dan 2**.

$$DISC = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{pengungkapan dalam SAP}}$$

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, maksudnya adalah variabel ini yang menjadi penyebab atas perubahan variabel

dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah.

### 3.3.2.1 Opini Audit

Dalam penelitian ini opini audit diukur dengan skala ordinal. Skala ordinal atau biasa disebut dengan skala peringkat adalah skala yang menggunakan bilangan atau lambang untuk menunjukkan tingkatan yang dijadikan sebagai objek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Opini audit memiliki lima (5) jenis kategori baik terhadap sektor publik maupun sektor pribadi. Berikut lima (5) opini audit yang diurutkan berdasarkan yang paling rendah:

1. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
2. Tidak Wajar (TW)
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
5. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sehingga dalam penelitian ini pengukuran untuk opini audit Wajar Tanpa Pengecualian akan diberi nilai 5, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas diberi nilai 4, Wajar Dengan Pengecualian diberi nilai 3, Tidak Wajar diberi nilai 2, dan Tidak Menyatakan Pendapat diberi nilai 1.

**Tabel 3. 1 Klasifikasi Opini Audit**

<b>Opini Audit terhadap LKPD</b>	<b>Nilai</b>
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	1

### 3.3.2.2 Temuan Audit

Temuan audit merupakan hasil dari evaluasi terhadap bukti audit yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara baik kesesuaian atau ketidaksesuaian kriteria audit atau peluang perbaikan. Maksud dari ketidaksesuaian adalah penyimpangan yang ditemukan dari bukti objektif atas kriteria audit yang telah ditetapkan auditor, oleh karena itu hal ini harus segera diinvestigasi agar bisa mengetahui dengan tepat kriteria audit mana yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan untuk perbaikan. penelitian ini akan menggunakan tingkat penyimpangan sebagai salah satu bentuk temuan audit. Tingkat penyimpangan dapat diukur dengan cara total temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibagi dengan total belanja daerah. Nominal temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan jumlah nominal kasus-kasus yang berdampak pada kerugian daerah. Jika nominal tingkat penyimpangan tinggi berarti pengelolaan keuangan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang semakin rendah.

$$DEVNOM = \frac{\text{nominal penyimpangan}}{\text{total belanja}}$$

**Tabel 3. 2 Ringkasan Operasional Variabel Independen dan Hipotesis**

Variabel Independen			Hipotesis
Variabel	Keterangan	Ukuran Variabel	
OPINI	Opini Audit	Nilai 5 jika WTP Nilai 4 jika WTP-DPP Nilai 3 jika WDP Nilai 2 jika TW Nilai 1 jika TMP	Positif
TEMUAN AUDIT	Temuan Audit yang diukur dengan tingkat penyimpangan	Perbandingan antara nominal penyimpangan dan total belanja.	Positif

*Sumber: Data diolah*

### 3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti yang bertujuan untuk meminimalisir pengaruh lain selain variabel bebas.

Diharapkan variabel kontrol ini dapat menambah keyakinan peneliti terhadap analisis interaksi antara variabel independen dan variabel dependen.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah karakteristik daerah. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya telah mencoba meneliti pengaruh karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan sampel yang berbeda-beda seperti latar belakang pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, ukuran daerah, dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan menggunakan karakteristik daerah sebagai berikut:

#### **3.3.3.1 Kekayaan Pemerintah**

Dalam penelitian (Ingram, 1984) kekayaan pemerintah mempunyai hubungan yang positif terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kekayaan pemerintah dapat memberikan gambaran terhadap kualitas manajemen, yang di mana gambaran tersebut menjadi sinyal dalam proses pengungkapan. Karena semakin tinggi kekayaan suatu daerah maka akan mempengaruhi pengungkapan pada laporan keuangan.

$$WEALTH = \frac{\text{pendapatan asli daerah ( PAD )}}{\text{total pendapatan}}$$

#### **3.3.3.2 Rasio Kemandirian**

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryantini, Darmayanti, dan Candraningrat, 2017) menyatakan bahwa rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan eksternal dan

seberapa besar tingkat keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan daerah. Dengan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari variabel rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

$$RSDPND = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan transfer}}$$

### 3.4 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini bersifat kuantitatif. Oleh karena itu pengujian dilakukan dengan cara menguji bagaimana hubungan antara variabel independen (variabel bebas), variabel dependen (variabel terikat), dan variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan data cross section dan model penelitian regresi yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan batas tertinggi (maksimum) dan batas terendah (minimum) terhadap data. Sedangkan pengujian asumsi dasar pada model regresi, dan pengujian hipotesis pada hasil regresi menggunakan t - statistik dan F – statistik.

#### 3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penulis melakukan analisis deskriptif terhadap data yang menjadi variabel penelitian ini. Data tersebut tersedia di dalam laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang menjadi sampel. adapun tujuan dari analisis statistik deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti bagaimana

distribusi dan perilaku data sampel. Analisis statistik deskriptif yang dilakukan terdiri dari *range*, *minimum*, *maximum*, *mean*, *standard deviation*, dan *variance*.

### **3.4.2 Analisis Korelasi Antar Variabel (*Pearson Correlation*)**

Analisis *pearson correlation* digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara dua variabel. Baik hubungan variabel independen dengan variabel dependen ataupun variabel independen dengan variabel independen bagaimana tingkat signifikansinya. Hubungan antara dua variabel tersebut digunakan untuk melihat apakah adanya potensi multikolinearitas, yaitu sebuah situasi yang menunjukkan apakah adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Jika hasil pengujian bernilai  $> 0,5$  maka korelasi antar variabel cukup kuat. Akan tetapi jika hasil pengujian bernilai  $< 0,5$  maka korelasi lemah.

### **3.4.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang wajib dipenuhi dalam analisis regresi. Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

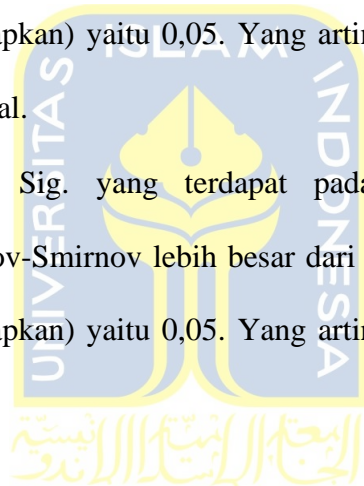
#### **3.4.3.1 Uji Normalitas Data**

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah



variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi data normal atau mendekati normal maka model regresi tersebut dikatakan baik. Uji F dan uji T mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika tidak maka uji statistik menjadi tidak valid. Dianjurkan untuk dilengkapi dengan uji statistik, salah satunya adalah statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. yang terdapat pada kolom Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari alpha (tingkat kesalahan yang telah ditetapkan) yaitu 0,05. Yang artinya data tersebut berdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai Sig. yang terdapat pada kolom Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari alpha (tingkat kesalahan yang telah ditetapkan) yaitu 0,05. Yang artinya data tersebut berdistribusi normal.



#### **3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity)**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ghozali. 2011) tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Gangguan heteroskedastisitas sering muncul pada data cross section, dan juga bisa terjadi pada data time series. Jika terdapat heteroskedastisitas dalam model ini, maka varians tidak sama atau error tidak. Jika terjadi gejala heteroskedastisitas akan berakibat pada sebuah keraguan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan.

### 3.4.3.3 Uji Multikolinearitas (Multicollinearity)

Tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam kenyataannya sulit sekali menemukan dua variabel bebas yang tidak berkorelasi (korelasi = 0), tetapi ada multikolinearitas yang signifikan dan tidak signifikan (mendekati 0). Multikolinearitas yang rendah menandakan model penelitian tersebut baik. Jika multikolinearitas tinggi maka tidak dapat memisahkan efek parsial dari satu variabel independen terhadap variabel independen lainnya. Multikolinearitas dapat dilihat jika correlation matrix pada program Eviews 8, jika korelasi antar variabel independen kurang dari 0,8 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Multikolinearitas dapat diatasi dengan cara menghilangkan atau menghapus salah satu variabel yang tidak signifikan.

### 2.3.1.1 Uji Autokorelasi

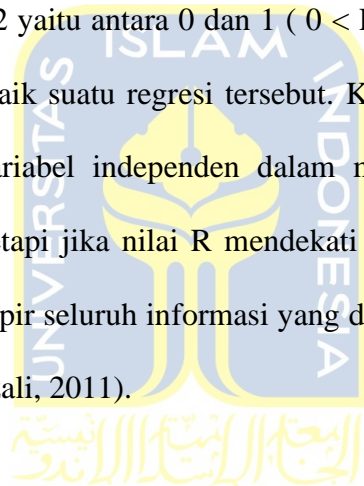
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali. 2011). Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi linear berganda biasanya menggunakan metode Durbin-Watson. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $d < dL$  atau  $d > (4-dL)$  maka hipotesis nol ditolak, yang artinya terdapat masalah autokorelasi.

2. Jika  $d$  terletak antara  $d_U$  dan  $(4-d_U)$  maka hipotesis nol diterima, yang artinya tidak ada autokorelasi.
3. Jika  $d$  terletak antara  $d_L$  dan  $d_U$  atau di antara  $(4-d_U)$  dan  $(4-d_L)$  maka dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

#### 3.4.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. Nilai dari  $R^2$  yaitu antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), jika nilai  $R^2$  semakin tinggi maka semakin baik suatu regresi tersebut. Karena jika nilai  $R$  menjauhi 1 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat sedikit. Akan tetapi jika nilai  $R$  mendekati 1 berarti variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2011).



#### 3.4.5 Uji Hipotesis

##### 3.4.5.1 Uji Kelayakan Model (F)

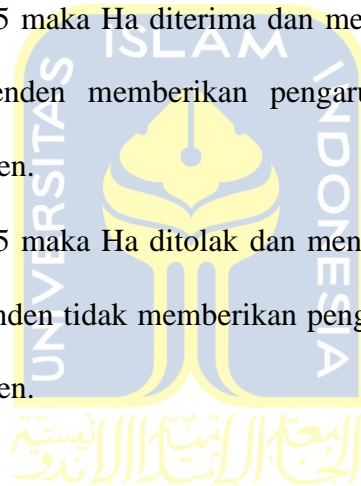
Tujuan dari Uji kelayakan model adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dalam penelitian dapat mempengaruhi variabel dependen. Sehingga dapat memberikan kesimpulan apakah model tersebut layak digunakan atau tidak. Signifikansi pengujian adalah 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Berdasarkan penelitian (Ghozali, 2011) ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas  $f$ -statistik  $> \alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak
2. Jika probabilitas  $f$ -statistik  $> \alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  diterima

### 3.4.5.2 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Tujuan dari uji t-statistik adalah untuk mengetahui signifikansi dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dapat dilihat dari probabilitas t-statistik, yang selanjutnya nilai probabilitas t-statistik ini dibandingkan dengan  $\alpha = 5\%$ , kriterianya sebagai berikut (Ghozali. 2011):

1. Jika  $t_{sig} < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan menolak  $H_o$ , yang berarti bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika  $t_{sig} > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_o$ , yang berarti bahwa variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Total keseluruhan dari LKPD provinsi yang diteliti sebanyak 136 laporan keuangan, yang terdiri dari 34 provinsi untuk laporan keuangan tahun 2016-2019. Seluruh laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didapatkan peneliti melalui *website* BPK RI. Variabel yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini telah tercantum dalam laporan keuangan tersebut seperti opini audit, tingkat penyimpangan, kekayaan pemerintah, dan rasio kemandirian.

**Tabel 4. 1 Jumlah Data Variabel**

Tahun	Telah diaudit BPK	Opini dari BPK		Data Tingkat Penyimpanan	Data Kekayaan Pemerintah	Data Rasio Kemandirian
		WTP	WDP			
2016	34	30	4	34	34	34
2017	24	34	0	34	34	34
2018	34	31	3	34	34	34
2019	34	34	0	34	34	34
Total	136	136		136	136	136

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yang dilakukan terdiri dari rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk mendeskripsikan data masing-masing variabel penelitian di mana untuk menentukan batas minimum dan batas maksimum data dari masing-masing variabel penelitian agar menghilangkan data-data yang bersifat outlier. Berikut hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan. Bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
OPINI AUDIT	136	2	3	5	4.90	0.444	0.197
TINGKAT PENYIMPANGAN	136	0.3636	0.00002	0.3636	0.014824	0.0534440	0.003
KEKAYAAN PEMERINTAH	136	0.7334	0.0002	0.7337	0.345267	0.1680362	0.028
RASIO KEMANDIRIAN	136	3.1406	0.0005	3.1411	0.691165	0.5485026	0.301
TINGKAT PENGUNGKAPAN	136	0.4118	0.5588	0.9706	0.811851	0.0927515	0.009
Valid N (listwise)	136						

Kesimpulan yang didapat dari analisis statistik deskriptif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Opini Audit, nilai rata-rata sebesar 4, 90. Dengan nilai Standar Deviasi sebesar 0,44. Untuk nilai tertinggi sebesar 5, 00 dan nilai terendah sebesar 3,00 di mana nilai tersebut didapat dari penilaian opini WTP yang diberi nilai 5 dan WDP yang diberi nilai 3 pada LKPD Provinsi dari tahun 2016 – 2019.
2. Pada variabel Tingkat Pengungkapan, nilai rata-rata sebesar 0, 0148. Dengan nilai Standar Deviasi sebesar 0, 0534. Untuk nilai tertinggi sebesar 0, 3636 atau 36,4% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Kalimantan

Barat pada tahun 2016. Dan nilai terendah sebesar 0,00002 atau 0,002% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Banten pada tahun 2017.

3. Pada variabel Kekayaan Pemerintah, nilai rata-rata sebesar 0,3452. Dengan nilai Standar Deviasi sebesar 0,1680. Untuk nilai tertinggi sebesar 0,7337 atau 73,37% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Dan nilai terendah sebesar 0,0002 atau 0,02% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017.
4. Pada variabel Rasio Kemandirian, nilai rata-rata sebesar 0,6911. Dengan nilai Standar Deviasi sebesar 0,5485. Untuk nilai tertinggi sebesar 3,1411 di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Dan nilai terendah sebesar 0,0005 di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017.
5. Pada variabel Tingkat Pengungkapan, nilai rata-rata sebesar 0,8118 atau 81,18%. Dengan nilai Standar Deviasi sebesar 0,0927. Untuk nilai tertinggi sebesar 0,9706 atau 97,06% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016. Dan nilai terendah sebesar 0,5588 atau 55,88% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2019.

#### **4.3 Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation)**

Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation) bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan

koefisien korelasi (r) dan jenis hubungan antar variabel x dan y dapat bersifat positif dan negatif.

**Tabel 4. 3 Analisis Korelasi Antar Variabel**

		OPINI AUDIT	TINGKAT PENYIMPANGAN	KEKAYAAN PEMERINTAH	RASIO KEMANDIRIAN	TINGKAT PENGUNGKAPAN
OPINI AUDIT	Pearson Corelation	1	(0.132)	0.197	0.025	0.066
	Sig. (2-tailed)		0.126	0.022	0.774	0.446
	N	136	136	136	136	136
TINGKAT PENYIMPANGAN	Pearson Corelation	(0.123)	1	(0.077)	(0.100)	(0.155)
	Sig. (2-tailed)	0.126		0.375	0.245	0.072
	N	136	136	136	136	136
KEKAYAAN PEMERINTAH	Pearson Corelation	0.197	(0.077)	1	0.833	0.086
	Sig. (2-tailed)	0.022	0.375		0.000	0.321
	N	136	136	136	136	136
RASIO KEMANDIRIAN	Pearson Corelation	0.025	(0.100)	0.833	1	0.174
	Sig. (2-tailed)	0.774	0.245	0.000		0.042
	N	136	136	136	136	136
TINGKAT PENGUNGKAPAN	Pearson Corelation	0.066	(0.155)	0.086	0.174	1
	Sig. (2-tailed)	0.446	0.072	0.321	0.042	
	N	136	136	136	136	136

Berdasarkan hasil uji Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation) dapat dinyatakan bahwa:

1. Nilai signifikansi opini audit terhadap temuan audit 0,126, rasio kemandirian 0,774, dan tingkat pengungkapan 0,446 maka dengan hasil tersebut dikatakan tidak berkorelasi. Pada kekayaan pemerintah 0,022 maka dengan hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara opini audit terhadap temuan audit, kekayaan pemerintah, rasio kemandirian dan tingkat pengungkapan tidak ada korelasi karena nilai *pearson correlation* di antara 0,00 – 0,20.



2. Nilai signifikansi temuan audit terhadap opini audit 0,126, kekayaan pemerintah 0,375, dan rasio kemandirian 0,245 maka dengan hasil tersebut dikatakan tidak berkorelasi. Pada tingkat pengungkapan 0,075 maka dengan hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara temuan audit terhadap opini audit, kekayaan pemerintah, rasio kemandirian dan tingkat pengungkapan tidak ada korelasi karena nilai *pearson correlation* di antara 0,00 – 0,20.
3. Nilai signifikansi kekayaan pemerintah terhadap temuan audit 0,375, dan tingkat pengungkapan 0,321 maka dengan hasil tersebut dikatakan tidak berkorelasi. Pada opini audit 0,022 dan rasio kemandirian 0,000 maka dengan hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara kekayaan pemerintah terhadap opini audit, temuan audit, dan tingkat pengungkapan tidak ada korelasi karena nilai *pearson correlation* di antara 0,00 – 0,20. Dan rasio kemandirian berkorelasi sempurna karena nilai *pearson correlation* di antara 0,81 – 1,00.
4. Nilai signifikansi tingkat penyimpangan terhadap opini audit 0,446, temuan audit 0,072, dan kekayaan pemerintah 0,321 maka dengan hasil tersebut dikatakan tidak berkorelasi. Pada rasio kemandirian 0,042 maka dengan hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara opini audit, temuan audit, dan tingkat pengungkapan tidak ada korelasi karena nilai *pearson correlation* di antara 0,00 – 0,20. Dan kekayaan pemerintah berkorelasi sempurna karena nilai *pearson correlation* di antara 0,81 – 1,00.

5. Nilai signifikansi rasio kemandirian terhadap opini audit 0,774 dan temuan audit 0,245 maka dengan hasil tersebut dikatakan tidak berkorelasi. kekayaan pemerintah 0,000 dan tingkat pengungkapan 0,042 maka dengan hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara opini audit, temuan audit, kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian tidak ada korelasi karena nilai *pearson correlation* di antara 0,00 – 0,20.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4. 4 Uji Normalitas Data**

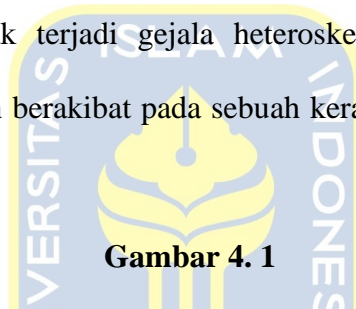
#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.08957206
Most Extreme Differences	Absolute	0.079
	Positive	0.048
	Negative	(0.079)
Test Statistic		0.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.039

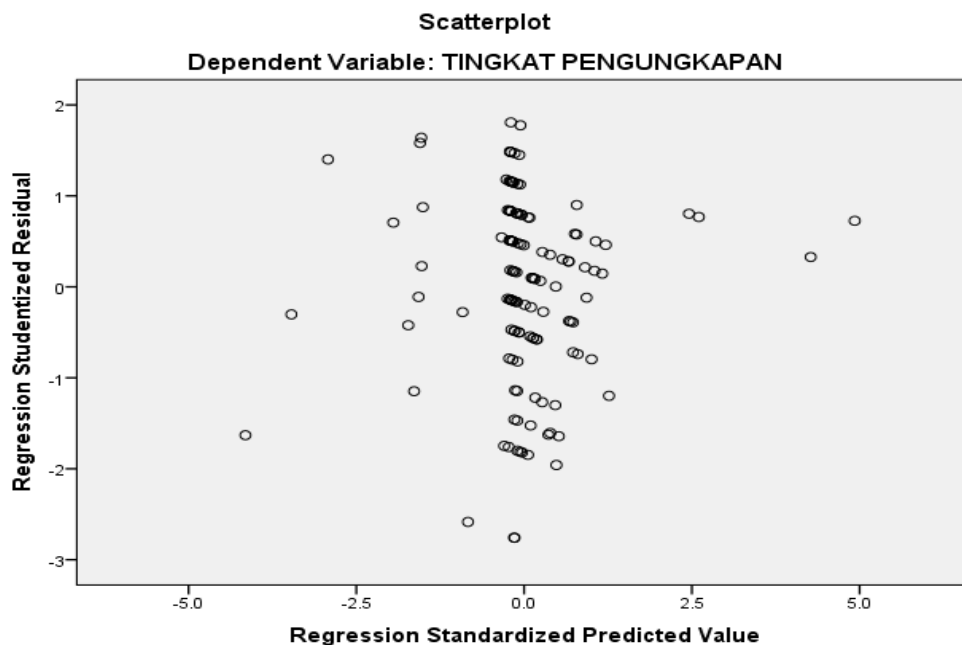
Berdasarkan hasil uji normalitas di atas bahwa nilai signifikansi sebesar 0,039 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.

#### 4.4.2 Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity)

Uji Heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika terjadi gejala heteroskedastisitas akan berakibat pada sebuah keraguan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan.



**Gambar 4. 1**



Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa, titik-titik data menyebar. pada gambar di atas titik-titik berada di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola,

Dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya masalah Heteroskedastisitas, sehingga uji asumsi klasik Heteroskedastisitas ini dapat dilanjutkan ke analisis selanjutnya yaitu regresi linear berganda.

**Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.729	0.090		8.140	0.000
OPINI AUDIT	0.018	0.019	0.088	0.979	0.329
TINGKAT PENYIMPANGAN KEKAYAAN PEMERINTAH RASIO KEMANDIRIAN	(0.217)	0.149	(0.125)	-1.462	0.146
	(0.134)	0.089	(0.242)	-1.503	0.135
	0.061	0.027	0.361	2.278	0.024

Jika nilai Sig. lebih dari 0,05 maka penelitian tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. pada 3 variabel lebih dari 0,05 berdasarkan nilai yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 3 variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas atau memenuhi syarat uji asumsi klasik. Sedangkan pada variabel rasio kemandirian nilai Sig. sebesar 0,024 di mana nilai tersebut di bawah 0,05 yang artinya terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.4.3 Uji Multikolinearitas (Multicollinearity)

**Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0.729	0.090		8.140	0.000		
	OPINI AUDIT	0.018	0.019	0.088	0.979	0.329	0.880	1.136
	TINGKAT PENYIMPANGAN KEKAYAAN PEMERINTAH	(0.217)	0.149	(0.125)	-1.462	0.146	0.970	1.031
	RASIO KEMANDIRIAN	(0.134)	0.089	(0.242)	-1.503	0.135	0.274	3.645
		0.061	0.027	0.361	2.278	0.024	0.283	3.530

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa, untuk melihat nilai tolerance adalah jika nilai tolerance  $> 0,10$  maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Pada data di atas menunjukkan nilai tolerance 4 variabel lebih dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Untuk melihat nilai VIF adalah jika nilai VIF  $< 10,00$  maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Pada data di atas menunjukkan nilai VIF 4 variabel kurang dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi penelitian ini tidak memenuhi syarat uji asumsi klasik

#### 4.4.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari Uji Autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t$  ( sebelumnya).

**Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.260 a	.067	.039	.0909293	1.947

Berdasarkan uji autokorelasi di atas dapat disimpulkan bahwa:

N = 136

d	dl	du	4-dl	4-du
1,947	1,679	1,788	2,321	2,212

Karena  $du < d < 4-du$  di mana  $1,788 < 1,947 < 2,212$  maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Untuk nilai dl dan du di dapat dari tabel Durbin-Watson di mana N = 136. sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi syarat uji asumsi klasik karena tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.5 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi berganda (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengukur

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 berarti variabel independen (X) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Y).

**Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.260 a	.067	.039	.0909293

Berdasarkan uji koefisien determinasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pada nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,039 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 3,9%.

**4.6 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yang di mana penjelasannya sebagai berikut:

1. Hipotesis alternatif (Ha), terdapat pengaruh yang signifikan dari X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y.

2. Hipotesis nihil ( $H_0$ ), tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  terhadap  $Y$ .

#### 4.6.1 Uji Kelayakan Model (F)

**Tabel 4. 9 Uji Kelayakan Model**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.078	4	.020	2.366	.050 <sup>b</sup>
Residual	1.083	131	.008		
Total	1.161	135			

Berdasarkan hasil uji hipotesis F, maka dapat disimpulkan bahwa, Sig. sebesar 0,050 yang artinya terdapat pengaruh signifikansi pada opini audit, temuan audit, kekayaan pemerintah, dan rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan ( $H_a$ ). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diperkirakan layak,

#### 4.6.2 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi.



**Tabel 4. 10 Uji t-statistik**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0.729	0.090		8.140	0.000
	OPINI AUDIT	0.018	0.019	0.088	0.979	0.329
	TINGKAT PENYIMPANGAN KEKAYAAN PEMERINTAH	(0.217)	0.149	(0.125)	-1.462	0.146
	RASIO KEMANDIRIAN	(0.134)	0.089	(0.242)	-1.503	0.135
		0.061	0.027	0.361	2.278	0.024

Berdasarkan hasil uji hipotesis T, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Opini Audit Sig. sebesar 0,329 yang di mana lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha).
2. Temuan Audit Sig. sebesar 0,146 yang di mana lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha).
3. Kekayaan Pemerintah Sig. sebesar 0,135 yang di mana lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha).
4. Rasio Kemandirian Sig. sebesar 0,024 yang di mana lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha).

#### **4.7 Pengaruh Opini Audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi di Indonesia**

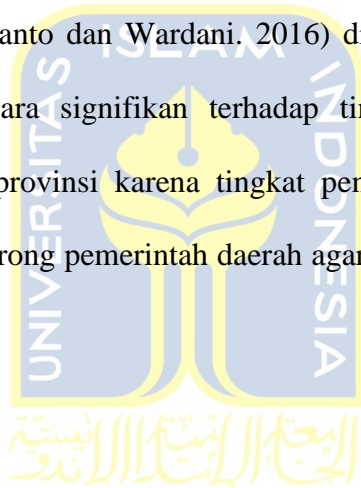
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, nilai sig. variabel opini audit yang diperoleh sebesar 0,329 atau 32,9%, dengan *significance level*  $\alpha = 0,05$  atau 5% yang artinya opini audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia, karena nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit ditolak yang artinya tidak didukung. Hasil ini menunjukkan jika opini audit yang diberikan BPK terhadap LKPD provinsi baik WTP atau WDP tidak mempengaruhi kualitas dalam pengungkapan laporan keuangan karena opini tersebut tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas dalam pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini membenarkan pernyataan bahwa opini audit terbukti tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan LKPD Provinsi sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Heriningsih dan Rushelistyani (2013).

#### **4.8 Pengaruh Temuan Audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi di Indonesia**

Temuan audit yang digunakan sebagai variabel diukur berdasarkan tingkat penyimpangan. Dalam penelitian ini tingkat penyimpangan yang dipilih adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan membandingkan antara nominal penyimpangan dengan total belanja daerah yang direalisasikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, nilai sig. variabel temuan audit yang diperoleh sebesar 0,146 atau 14,6% dengan *significance level*  $\alpha = 0,05$  atau 5% yang artinya temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia, karena nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit ditolak

yang artinya tidak didukung Yang artinya bahwa besarnya temuan audit yang diperoleh BPK tidak mempengaruhi pemerintah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini juga membuktikan bahwa hasil temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah. Karena jika BPK menemukan banyaknya penyimpangan audit, maka BPK akan semakin mendalami pengoreksian sehingga kemungkinan untuk bertambahnya pengungkapan semakin besar. Dengan pernyataan tersebut membuktikan bahwa hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priharjanto dan Wardani, 2016) di mana tingkat penyimpangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi karena tingkat penyimpangan yang besar tidak menjamin dapat mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan pengungkapan laporan keuangan.



#### **4.9 Pengaruh karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi di Indonesia**

Karakteristik daerah dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol yang diukur berdasarkan kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, nilai sig. variabel karakteristik daerah terhadap kekayaan pemerintah yang diperoleh sebesar 0,135 atau 13,5% dengan *significance level*  $\alpha = 0,05$  atau 5% yang artinya kekayaan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia, karena nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

kekayaan pemerintah ditolak yang artinya tidak didukung. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Artha dkk. 2015, Noviyanti dan Kiswanto. 2016) di mana kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Karena semakin besar kekayaan pemerintah suatu provinsi maka akan semakin tinggi risiko terjadinya penyimpangan, baik terhadap sistem pengendalian internal maupun terhadap kepatuhan perundang-undangan. Hal ini terbukti banyaknya kasus-kasus penyelewengan anggaran atau SDA yang dilakukan pada pemerintahan.

Sedangkan pada rasio kemandirian nilai yang diperoleh sebesar 0.024 atau 2,4%, dengan *significance level*  $\alpha = 0,05$  atau 5% yang artinya rasio kemandirian signifikan, karena nilai sig kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian diterima yang artinya didukung. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa besarnya dana transfer yang didapatkan oleh suatu pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Shafira Ramadhia Utami Sulardi, 2019) yang menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka pemerintah daerah akan meningkatkan atau memperluas pengungkapan pada laporan keuangannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit dengan pengukuran berdasarkan tingkat penyimpangan dan karakteristik daerah dengan pengukuran berdasarkan kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Data sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 136 laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang di mana setiap tahunnya berjumlah 34 laporan keuangan.

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran atas hasil penelitian yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat penyimpangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

## 5.2 Saran

Penulis berharap untuk penelitian yang membahas mengenai kinerja dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan datang mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan berkualitas. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah variabel yang diduga memiliki keterkaitan dengan kinerja dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah seperti latar belakang pemerintah daerah, tingkat SPI, tingkat ketidakpatuhan, dan jumlah SKPD.
2. Pemerintah daerah diharapkan memiliki semangat saing dalam berlomba-lomba meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya dengan pengungkapan yang memadai agar temuan yang didapat sedikit yang di mana dapat mempengaruhi penentuan opini yang diberikan oleh BPK.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel seluruh kabupaten atau kota pada setiap provinsi dengan tahun pengamatan 5 tahun sebelum tahun terkini. Sehingga hasil penelitian jauh lebih berkualitas.

### 5.3 Implikasi

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah dengan pengukuran kekayaan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi di Indonesia. Artinya pada 3 variabel tersebut membuktikan bahwa hasil yang baik terhadap opini audit, temuan audit yang tinggi, dan kekayaan pemerintah yang banyak tidak mempengaruhi pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hanya rasio kemandirian yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi di Indonesia, di mana semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah maka semakin baik pula hasil dari pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Implikasi lain dari penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah memiliki semangat saing dalam berlomba-lomba meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya dengan pengungkapan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Evanti. (2012). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Indonesia.
- Artha, Risma., Diri., Basuki, Prayitno dan MT, Alamsyah., (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi*, Volume 11, hal 214-229.
- Ghozali, Imam. (2011). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Girsang, H.A., & Yuyetta, E.N. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada LKPD kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M. S., (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Selemba Empat.
- Heriningsih, Sucahyo dan Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*, Volume 11, hal. 1-86.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 1-26. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>
- Ingram, R. W. Spring (1984). Economic incentives and the choice of state government accounting practices. *Journal of Accounting Research* 22(1): 126- 144.
- Lesmana, Sigit Indra. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Liestiani, A. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik



Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-JRA*, 07(01), 32–45. <https://doi.org/10.1186/1476-4598-10-45>

Martani, Dwi dan Liestiani, Annisa. (2008). Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*. Vol. 3. No. 1. p. 67-84.

Muflihatin, A'Alimatul. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Naopal, F., Rahayo, S., & Yudowati, S.P. (2017). Pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets*, 56-68.

Noviyanti, Nur., Ade dan Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerahh. *Accounting Analysis Journal*, Volume 1, hal. 1-10

Patrick, Patricia A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States - Pennsylvania. (Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*, Publication No. AAT 3266180).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Priharjanto, Akhmad., Wardani, Yusniar Yuliana. (2016). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik daerah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.

Qoyimah, S. N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

Rahmayanti, D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

Sari, Adelia Pramita Sari., Martani, Dewi martini., Setyaningrum. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Universitas Indonesia.

Serafica, Gischa. (2020). Penyebab Krisis Moneter di Indonesia. Diakses pada 1 Juni 2021, dari

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/170000769/penyebab-krisis-moneter-di-indonesia>

- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>.
- Suhardjanto, D., Yulianingtyas, R. (2011). Pengaruh Karakteristik daerah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret.
- Sulardi, Shafira Ramadhania Utami. (2019). Pengaruh Karakteristik daerah Daerah, Opini Audit, Dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Lporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret.
- Suparno, & Nanda, R. (2016). Pengaruh kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional, dan spesialisasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 105-118.
- Suryaningsih, Ni. Made, & Sisdyani, Eka Ardhani. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 15, hal. 1453-1481.
- Suryantini, N.S., Darmayanti, N.A., & Candraninggrat, I.R. (2017). Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Prosiding Seminar Nasional AIMI*, 7-9.
- Temuan audit merupakan hasil dari evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria audit. Diakses dari 2019 Belumlama.com - All Right Reserved.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 ayat (1) tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Intansi Pemerintah.

## LAMPIRAN 1

### Item Pengungkapan

NO	ITEM PENGUNGKAPAN	SKOR
	informasi umum tentang entitas pelaporan dan akuntansi	
1.	maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
2.	domisili	1
3.	bentuk hukum	1
4.	jurisdiksi	1
5.	sifat operasi	1
6.	kegiatan pokok	1
7.	landasann perundangan	1
8.	sistematika penyajian atas CALK	1
	kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro	
9.	produk domestik regional bruto	1
10.	pertumbuhan ekonomi	1
11.	tingkat inflansi	1
12.	kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro	1
13.	indikator pencapaian kerja	1
14.	ikhtisar pencapaian target keuangan	1
15.	hambatan pencapaian target keuangan	1
	kebijakan akuntansi	
16.	entitas pelaporann	1
17.	basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	1
18.	dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan	1
19.	penetapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan SAP	1
	penjelasan pos-pos laporan keuangann	
	laporan realisasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan)	
20.	anggarrann	1
21.	realisasi	1
22.	pre sentasi pencapaian	1
23.	penjelasan perbedaan anggaran dan realisasi	1
24.	perbandingan dengan periode lalu	1
25.	rincian lebih lanjut	1
	neraca (aset, kewajiban, dan ekuitas)	
26.	perbandingan dengan periode lalu	1
27.	penjelasan perbedaan periode berjalan dengan periode lalu	1
28.	rincian lebih lanjut akun	1
	laporan arus kas	
29.	perbandingan dengan periode lalu	1
30.	penjelasan perbedaan periode berjalan dengan periode lalu	1
31.	rincian lebih lanjut akun	1
32.	informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka	1
33.	pengungkapan-pengungkapan lain	1
34.	lampiran	1
	total	34

## LAMPIRAN 2

### Skor Item Pengungkapan

NO	PROVINSI	SKOR ITEM PENGUNGKAPAN KPDTA 2016																																		TOTAL	RASIO	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1.	aech	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
2.	sumatra utara	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,676471
3.	sumatra barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,823529
4.	riau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176
5.	kepulauan riau	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
6.	lambi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	0,970588
7.	sumatra selatan	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	0,852941
8.	bangka belitung	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0,735294
9.	bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,823529
10.	lampung	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
11.	DKI jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	0,970588
12.	java barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
13.	banten	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
14.	java tengah	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706
15.	DY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
16.	java timur	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0,735294
17.	bidj	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	0,852941
18.	NTB	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
19.	NTT	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
20.	sulawesi utara	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706
21.	sulawesi barat	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	0,647059
22.	sulawesi tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176
23.	sulawesi tenggara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	0,852941
24.	sulawesi selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
25.	gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706
26.	kalinantan utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706
27.	kalinantan barat	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0,705882
28.	kalinantan tengah	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,823529
29.	kalinantan selatan	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
30.	kalinantan timur	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0,705882
31.	maluku	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
32.	maluku utara	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765
33.	papua barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,823529
34.	papua	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,823529

SKRIPSI PENGINGKAPAN UPTD TA. 2017

NO	PROVINSI	TOTAL																																		RASIO		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	aach	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765
2	sumatral utara	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0,706682
3	sumatrabarat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
4	riau	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353	
5	kepulauannya	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765	
6	jambi	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,82529	
7	sumatraselatan	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706	
8	bengkabellitung	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,676471	
9	bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353	
10	lampung	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118	
11	DKI jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176	
12	jawa barat	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	0,852941	
13	banten	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706	
14	jawadengah	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,706682	
15	DY	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118	
16	jawadimur	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118	
17	bali	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	0,852941	
18	NIB	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706	
19	MIT	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0,706682	
20	sulawesi utara	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	0,852941	
21	sulawesi barat	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	0,647059	
22	sulawesi tengah	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	0,647059	
23	sulawesi tenggara	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	1,058824	
24	sulawesi selatan	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,676471	
25	gionrtido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353	
26	kalimantan utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765	
27	kalimantan barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,558824		
28	kalimantan tengah	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,82529	
29	kalimantan selatan	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118	
30	kalimantan timur	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,676471	
31	maluku	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,647059	
32	malukutara	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118	
33	papua barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706	
34	papua	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706	

NO	PROVINSI	SKRIPSI/PEMB. NKKAPANIKFOTAZ2018																																		TOTAL	RASIO		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34	0,911765	
2	sumatra utara	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0,736294
3	sumatra barat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34	0,911765
4	nias	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	0,882353
5	kepulauan nias	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176
6	jabari	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,852941
7	sumatra selatan	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0,736294
8	bangka belitung	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0,558824
9	bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
10	lampung	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
11	DKI jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176
12	jabar barat	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765
13	banten	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706
14	javatengah	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0,706882
15	DY	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,828529
16	javatimur	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
17	beli	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
18	NIB	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
19	NIT	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706
20	sulawesi utara	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353
21	sulawesi barat	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	0,647159
22	sulawesi tengah	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0,736294
23	sulawesi tenggara	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
24	sulawesi selatan	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,676471
25	gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765
26	kalimantan utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765
27	kalimantan barat	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0,588235
28	kalimantan tengah	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
29	kalimantan selatan	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	0,852941
30	kalimantan timur	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,676471
31	maluku	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,676471
32	maluku utara	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118
33	papua barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706
34	papua	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,764706

SKRIPSI/TEMA/PELAKSANAAN/KEFITA, 2019

NO	PROVINSI	TOTAL																																		RASIO	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1.	aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38	0,970888
2.	sumatratara	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,76706	
3.	sumatrabarat	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,882353	
4.	riau	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
5.	kepulauanriau	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
6.	lambi	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
7.	sumatraselatan	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,794118		
8.	bangkabelitung	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,588624		
9.	bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176		
10.	lampung	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,829529		
11.	DKI jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176		
12.	jabarabarat	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,882353		
13.	bantenn	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
14.	jawatenggh	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	0,647059		
15.	DY	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,829529		
16.	jawatimur	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
17.	bali	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
18.	NIB	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
19.	NIT	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	0,76706		
21.	suawesi utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765		
21.	suawesi barat	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
22.	suawesi tengah	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765	
23.	suawesi tenggara	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,829529		
24.	suawesi selatan	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
25.	gontalo	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	0,941176		
26.	kalimantan utara	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765		
27.	kalimantan barat	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
27.	kalimantan tengah	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
29.	kalimantan selatan	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
31.	kalimantan timur	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,829529		
31.	maluku	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	0,852941		
32.	maluku utara	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,882353		
33.	pepua barat	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,829529		
34.	pepua	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,911765		

### LAMPIRAN 3

#### Opini Audit

PROVINSI	OPINI AUDIT			
	2016	2017	2018	2019
NAD	WTP	WTP	WTP	WTP
sumatra utara	WTP	WTP	WTP	WTP
sumatra barat	WTP	WTP	WTP	WTP
riau	WTP	WTP	WTP	WTP
kepulauan riau	WTP	WTP	WTP	WTP
jambi	WTP	WTP	WTP	WTP
sumatra selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
bangka belitung	WDP	WTP	WTP	WTP
bengkulu	WDP	WTP	WTP	WTP
lampung	WTP	WTP	WTP	WTP
DKI jakarta	WDP	WTP	WTP	WTP
jawa barat	WTP	WTP	WTP	WTP
banten	WTP	WTP	WTP	WTP
jawa tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
DIY	WTP	WTP	WTP	WTP
jawa timur	WTP	WTP	WTP	WTP
bali	WTP	WTP	WTP	WTP
NTB	WTP	WTP	WTP	WTP
NTT	WTP	WTP	WTP	WTP
sulawesi utara	WTP	WTP	WTP	WTP
sulawesi barat	WTP	WTP	WTP	WTP
sulawesi tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
sulawesi tenggara	WTP	WTP	WTP	WTP
sulawesi selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
gorontalo	WTP	WTP	WTP	WTP
kalimantan utara	WTP	WTP	WTP	WTP
kalimantan barat	WTP	WTP	WDP	WTP
kalimantan tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
kalimantan selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
kalimantan timur	WTP	WTP	WTP	WTP
maluku	WTP	WTP	WDP	WTP
maluku utara	WDP	WTP	WDP	WTP
papua barat	WTP	WTP	WTP	WTP
papua	WTP	WTP	WTP	WTP



## LAMPIRAN 4

### Tingkat Penyimpangan

provinsi	2016			2017			2018			2019		
	nominal penyimpangan	total belanja	CBN/CM	nominal penyimpangan	total belanja	CBN/CM	nominal penyimpangan	total belanja	CBN/CM	nominal penyimpangan	total belanja	CBN/CM
aach	Rp 3574.732.094	Rp 12.119.713.196.647	0,00294952	Rp 369.265.238.052	Rp 13.832.848.610.138	0,00269408	Rp 32.619.395.291	Rp 12.306.306.187.481	0,00265052	Rp 5.065.889.704	Rp 12.488.621.461.071	0,00040691
sumatrabara	Rp 25.990.165.825	Rp 6.701.774.888.174	0,003819416	Rp 20.992.138.976	Rp 10.488.397.953.653	0,002011272	Rp 45.751.195.793	Rp 10.999.656.938.291	0,00415832	Rp 7.767.208.892	Rp 10.170.845.213.205	0,000768574
sumatrabarat	Rp 1.752.017.634	Rp 4.934.037.298.780	0,003524962	Rp 3.915.641.486	Rp 5.739.818.392.401	0,00067982	Rp 955.409.194	Rp 6.267.861.888.291	0,00015418	Rp 3.989.855.429	Rp 5.641.332.379.495	0,000703774
riau	Rp 20.667.913.620	Rp 8.781.998.149.824	0,002369393	Rp 12.790.565.391	Rp 9.188.741.993.688	0,001391984	Rp 9.957.307.907	Rp 8.489.960.058.792	0,00117566	Rp 28.106.092.999	Rp 8.680.390.951.117	0,003234157
kepulauanriau	Rp 2.698.720.677	Rp 2.895.894.362.891	0,00094671	Rp 809.921.600	Rp 3.272.498.783.538	0,00025664	Rp 3.181.616.540	Rp 3.419.789.812.825	0,00093055	Rp 1.295.219.695	Rp 3.118.309.518.797	0,000410787
jarh	Rp 1.871.220.000	Rp 3.294.494.968.678	0,000567996	Rp 8151.621.768	Rp 41.321.941.881.087	0,001922553	Rp 14.261.500.000	Rp 4.198.255.716.275	0,00399701	Rp 574.394.001.000	Rp 3.945.292.724.212	0,145537807
sumatraselatan	Rp 1.915.196.711.709	Rp 4.962.572.330.784	0,305324962	Rp 89.889.963.872	Rp 6.419.382.494.458	0,01402981	Rp 9.496.009.864	Rp 7.941.149.670.102	0,00188294	Rp 3.068.259.994	Rp 6.422.760.771.590	0,000477717
bangkabelitung	Rp 1.101.280.500	Rp 2.039.868.292.395	0,000530055	Rp 3.209.407.191	Rp 2.399.078.163.818	0,00135908	Rp 894.077.000	Rp 2.354.345.568.587	0,00065277	Rp 104.246.078	Rp 2.264.022.634.745	4,60492E-05
bangkulu	Rp 48.786.509.165	Rp 2.029.690.295.400	0,02406245	Rp 14.899.981.457	Rp 2.867.213.305.656	0,00196677	Rp 3.692.472.584	Rp 2.979.578.235.902	0,00129926	Rp 6.486.572.645	Rp 3.118.309.518.797	0,002001611
lampung	Rp 2.225.612.184	Rp 5.495.921.595.655	0,000406365	Rp 15.957.488.204	Rp 6.948.698.057.138	0,000235425	Rp 6.012.896.422	Rp 7.598.989.965.120	0,00079757	Rp 3.492.510.154	Rp 5.593.697.872.359	0,000628699
Dki Jakarta	Rp 21.751.000.000	Rp 47.128.810.245.654	0,000451224	Rp 172.777.389.599	Rp 51.066.081.379.887	0,00389405	Rp 8.538.619.725	Rp 61.401.121.851.157	0,00013904	Rp 6.978.901.000	Rp 64.091.287.449.013	0,000108876
lawabarat	Rp 9.720.299.316	Rp 27.621.964.467.242	0,000351905	Rp 10.366.975.411	Rp 32.705.748.465.378	0,000169657	Rp 7.554.062.790	Rp 33.393.624.961.824	0,00026592	Rp 2.376.607.465	Rp 35.893.066.126.516	6,63294E-05
banten	Rp 7.419.591.509	Rp 8.935.813.442.214	0,000841251	Rp 21.918.866	Rp 9.512.813.119.364	2,30041E-05	Rp 2.317.880.488	Rp 9.992.819.311.365	0,00029055	Rp 6.398.298.307	Rp 8.351.271.881.359	0,000790952
lawatengah	Rp 38.856.170.422	Rp 19.354.374.825.988	0,000076117	Rp 266.105.781.373	Rp 22.894.713.018.754	0,001628102	Rp 4.461.089.706	Rp 24.498.632.557.339	0,00018224	Rp 19.109.598.572	Rp 18.466.995.979.599	0,001035359
DY	Rp 108.010.400	Rp 3.847.962.965.847	2,80895E-05	Rp 6.767.395.299	Rp 4.920.626.765.619	0,001376912	Rp 7.059.954.193	Rp 5.296.409.591.714	0,00139194	Rp 1.055.422.292	Rp 4.923.871.345.962	0,000239911
lawatimur	Rp 4.650.980.438	Rp 28.699.963.965.118	0,000194929	Rp 7.763.516.611	Rp 28.878.134.625.610	0,000289997	Rp 1.301.975.489.498	Rp 30.652.099.021.870	0,00496205	Rp 3.793.329.681	Rp 25.999.698.270.716	0,000149924
bali	Rp 1.279.598.319	Rp 5.400.993.529.304	0,000236049	Rp 172.797.516	Rp 6.070.535.393.785	2,84649E-05	Rp 11.786.966.949	Rp 5.998.547.092.292	0,00196497	Rp 4.413.142.374	Rp 4.408.625.560.597	0,000021611
NIB	Rp 5.325.532.300	Rp 3.764.301.951.075	0,001414746	Rp 6.448.294.013	Rp 5.255.320.278.857	0,00127003	Rp 1.306.359.362	Rp 5.299.531.399.450	0,00024568	Rp 2.665.124.898	Rp 4.375.546.682.895	0,000618924
NIT	Rp 7.295.312.881	Rp 3.702.912.449.649	0,001970155	Rp 999.788.202	Rp 4.634.876.188.618	0,00021571	Rp 1.044.894.648.665	Rp 4.896.899.267.378	0,21557031	Rp 490.887.700	Rp 4.788.379.563.095	9,05559E-05
slawesi utara	Rp 2.247.731.307	Rp 2.801.145.395.510	0,00069498	Rp 6.964.441.394	Rp 3.981.571.793.429	0,001946064	Rp 1.771.728.094	Rp 3.656.101.961.038	0,00049499	Rp 4.699.535.557	Rp 3.674.801.265.294	0,001278894
slawesi barat	Rp 1.698.701.600	Rp 1.765.977.598.989	0,000939254	Rp 6.975.138.154	Rp 1.927.377.319.821	0,00061898	Rp 3.219.969.656	Rp 1.796.622.067.295	0,00083782	Rp 289.135.412	Rp 1.784.439.255.571	0,000160392
slawesi tengah	Rp 1.623.390.397	Rp 3.178.114.481.726	0,000510803	Rp 21.894.248.548	Rp 3.445.777.071.451	0,003659997	Rp 35.678.179.155	Rp 3.698.013.037.630	0,00399418	Rp 390.722.789	Rp 4.088.771.219.451	9,53244E-05
slawesi tenggara	Rp 2.189.510.513	Rp 2.663.870.374.415	0,000821926	Rp 1.871.493.989.087	Rp 3.594.111.159.552	0,003698717	Rp 51.784.688.219	Rp 3.596.474.466.548	0,01488888	Rp 2.447.041.399	Rp 3.793.694.367.363	0,000658245
slawesi selatan	Rp 3.958.889.940	Rp 6.990.978.668.388	0,000571188	Rp 5.088.270.057	Rp 8.892.199.691.536	0,000569971	Rp 495.697.800	Rp 9.382.152.987.945	4,7758E-05	Rp 3.458.021.739	Rp 6.322.780.771.590	0,000549315
ggrontalo	Rp 761.9150.265	Rp 1.956.894.748.794	0,004774215	Rp 680.825.829	Rp 1.798.195.598.213	0,000991695	Rp 7.178.446.905	Rp 1.688.164.978.490	0,00090959	Rp 1.493.792.792	Rp 1.779.814.813.995	0,000259812
kalimantan utara	Rp 3.771.904.038	Rp 2.956.538.716.397	0,001476399	Rp 2.652.451.208	Rp 2.454.188.857.402	0,00080785	Rp 3.350.981.329	Rp 2.352.894.156.499	0,00142404	Rp 1.304.067.200	Rp 2.131.825.490.532	0,000611714
kalimantan barat	Rp 1.570.913.846.239	Rp 4.300.618.799.065	0,36595368	Rp 374.071.048.590	Rp 5.239.738.610.869	0,001118969	Rp 1.492.046.908.089	Rp 5.341.404.894.197	0,27184735	Rp 21.764.001.000	Rp 4.655.295.329.799	0,000494516
kalimantan tengah	Rp 1.871.616.304	Rp 3.174.705.762.288	0,000698954	Rp 6.276.291.465	Rp 3.686.888.215.702	0,001702916	Rp 9.666.374.728	Rp 4.547.699.791.661	0,00212555	Rp 70.755.487.057	Rp 4.312.954.965.465	0,016416327
kalimantan selatan	Rp 1.196.785.090	Rp 5.178.766.888.188	0,000231095	Rp 73.306.507.596	Rp 5.846.601.626.741	0,002540029	Rp 1.487.909.050	Rp 6.082.997.192.592	0,0002964	Rp 1.574.315.948	Rp 5.562.648.675.899	0,00028455
kalimantan timur	Rp 393.637.259	Rp 7.601.242.398.699	4,46381E-05	Rp 8.826.902.555	Rp 8.277.955.999.422	0,000707994	Rp 852.225.947	Rp 9.345.057.068.691	9,2265E-05	Rp 6.072.107.127	Rp 6.488.228.331.289	0,000999895
maluku	Rp 12.585.463.506	Rp 2.579.826.897.671	0,04837096	Rp 6.909.898.997	Rp 2.841.168.593.139	0,002429475	Rp 38.276.417.135	Rp 3.088.969.766.757	0,01094292	Rp 163.264.536	Rp 2.799.044.049.239	5,91789E-05
maluku utara	Rp 4.659.627.950	Rp 2.024.038.802.485	0,00302146	Rp 41.092.599.590	Rp 2.298.807.481.032	0,00192144	Rp 1.381.400.715	Rp 2.486.771.027.418	0,0006669	Rp 2.679.972.956	Rp 2.474.855.784.945	0,001060455
papubarat	Rp 431.629.158.898	Rp 6.464.612.242.318	0,00746024	Rp 2.454.070.000	Rp 7.016.198.265.404	0,000949772	Rp 3.465.947.113	Rp 6.947.065.392.891	0,00089459	Rp 4.788.119.775	Rp 5.439.692.414.884	0,0008891
papua	Rp 10.163.900.000	Rp 11.998.494.421.589	0,000846221	Rp 30.949.517.840	Rp 13.398.392.248.301	0,000281359	Rp 34.651.502.621	Rp 13.186.886.998.770	0,00264299	Rp 1.800.000.001.000	Rp 10.302.640.294.202	0,174724957

## LAMPIRAN 5

### Kekayaan Pemerintah

provinsi	2016			2017			2018			2019		
	RPO	total pendapatan	wealth	RPO	total pendapatan	wealth	RPO	total pendapatan	wealth	RPO	total pendapatan	wealth
ach	Rp 200.809.455,33	Rp 12.364.959.961,47	0,166893	Rp 2.263.315.988,89	Rp 143.919.519.016	0,198667	Rp 2.393.353.862,5	Rp 14.427.880.057,98	0,165038	Rp 2.689.024.711,44	Rp 15.758.019.011,42	0,173216
sumrabara	Rp 4.964.681.008,88	Rp 11.406.689.041,1	0,445223	Rp 5.287.484.015,0	Rp 12.294.687.861,58	0,492606	Rp 5.689.960.594,8	Rp 12.780.883.881,4	0,469153	Rp 5.761.204.420,61	Rp 13.093.986.548,48	0,444766
sumrabast	Rp 1.964.189.757,88	Rp 4.624.684.565,88	0,424708	Rp 2.181.000.919,8	Rp 6.068.686.689,6	0,330588	Rp 2.275.900.889,6	Rp 6.292.897.681,02	0,361983	Rp 2.384.488.938,6	Rp 6.380.887.041,94	0,368678
itau	Rp 3.110.661.187,66	Rp 6.920.686.690,1	0,448844	Rp 3.360.089.519,9	Rp 7.920.478.823,8	0,426846	Rp 3.669.335.740,12	Rp 8.489.911.049,6	0,428732	Rp 3.966.210.565,8	Rp 8.708.286.019,9	0,448886
leguamniau	Rp 1.093.887.418,66	Rp 2.914.686.601,62	0,374876	Rp 1.084.888.434,0	Rp 3.252.297.503,6	0,336681	Rp 1.220.788.269,6	Rp 3.500.017.243,02	0,350708	Rp 1.311.704.305,07	Rp 3.989.451.043,6	0,334662
larbi	Rp 1.288.514.681,18	Rp 3.384.788.821,68	0,380893	Rp 1.980.384.687,32	Rp 4.811.788.611,2	0,412653	Rp 1.666.889.987,8	Rp 4.402.484.565,81	0,374286	Rp 1.681.889.943,6	Rp 4.551.888.887,6	0,368888
sumrabastan	Rp 2.561.075.943,88	Rp 6.682.809.996,6	0,384281	Rp 3.011.688.438,8	Rp 8.189.881.811,78	0,368828	Rp 3.580.017.712,88	Rp 9.141.371.366,88	0,388888	Rp 3.841.908.621,1	Rp 9.280.742.024,6	0,368888
bangkabelung	Rp 54.284.488,88	Rp 1.988.888.281,17	0,278888	Rp 78.882.881	Rp 3.800.489.84,8	0,012448	Rp 80.411.774,81	Rp 2.680.486.388,67	0,388888	Rp 86.701.086,82	Rp 2.681.286.888,6	0,388888
bangulu	Rp 781.967.340,88	Rp 2.388.888.881,98	0,330888	Rp 804.558.889,4	Rp 2.804.578.888,6	0,288888	Rp 872.277.888,6	Rp 2.681.888.882,186	0,388888	Rp 886.488.888,8	Rp 2.984.079.413,8	0,288888
lampung	Rp 2.888.786.281,18	Rp 5.888.728.911,11	0,488888	Rp 2.780.986.488,8	Rp 6.888.788.018,82	0,408888	Rp 2.884.286.280,8	Rp 7.088.888.682,8	0,408888	Rp 3.088.087.281,18	Rp 7.288.888.888,8	0,418888
DI jakarta	Rp 3.688.880.788	Rp 58.788.883.888	0,008888	Rp 4.881.488.887,8	Rp 64.888.888.888,2	0,672248	Rp 4.832.888.881,1	Rp 61.288.884.288,8	0,708888	Rp 4.570.400.888,2	Rp 62.888.888.888,8	0,738888
jabar	Rp 17.028.881.888,2	Rp 28.028.788.888,2	0,607888	Rp 18.011.288.888,2	Rp 38.888.384.288,2	0,468888	Rp 19.628.988.888,8	Rp 38.384.788.888,8	0,568888	Rp 21.284.288.888,07	Rp 38.888.888.888,8	0,548888
bant	Rp 548.188.788,88	Rp 888.888.488,48	0,611128	Rp 578.371.342,47	Rp 978.088.888,8	0,588888	Rp 639.888.288,6	Rp 1.030.388.888,8	0,618888	Rp 702.388.888,8	Rp 1.121.888.888,8	0,628888
javatengah	Rp 11.940.287.288,8	Rp 18.882.257.888,8	0,638888	Rp 12.947.888,8	Rp 28.081.048.888,8	0,008888	Rp 18.118.888.888,8	Rp 24.788.888.888,8	0,748888	Rp 14.489.942.888,8	Rp 28.888.888.888,8	0,518888
DI	Rp 1.688.888.888,2	Rp 3.888.888.888,8	0,438888	Rp 1.681.988.888,8	Rp 5.088.241.288,8	0,338888	Rp 2.007.288.888,8	Rp 5.488.088.888,8	0,368888	Rp 2.088.888.888,8	Rp 6.688.888.888,8	0,318888
javatimur	Rp 15.807.888.888,6	Rp 24.982.128.478,8	0,638888	Rp 17.381.078.684,2	Rp 28.881.081.018,6	0,600088	Rp 18.581.088.888,8	Rp 31.988.888.888,8	0,588888	Rp 19.387.128.488,6	Rp 38.488.888.888,8	0,570088
bali	Rp 3.041.888.888,6	Rp 5.280.078.288,6	0,588888	Rp 3.388.428.888,6	Rp 5.988.188.888,6	0,578888	Rp 3.788.488.888,6	Rp 6.288.388.888,6	0,608888	Rp 4.088.888.888,6	Rp 6.688.888.888,6	0,618888
NB	Rp 1.388.888.888,8	Rp 3.988.888.888,8	0,348888	Rp 1.681.488.888,8	Rp 5.088.188.888,8	0,338888	Rp 1.680.407.078,2	Rp 4.981.288.888,8	0,388888	Rp 1.887.488.888,8	Rp 5.188.888.888,8	0,378888
NT	Rp 988.888.888,2	Rp 3.888.888.888,2	0,258888	Rp 1.087.488.888,2	Rp 4.702.888.888,2	0,228888	Rp 1.488.888.888,2	Rp 4.781.088.888,2	0,318888	Rp 1.288.888.888,2	Rp 5.381.088.888,2	0,238888
slaves utaa	Rp 981.048.888,07	Rp 2.888.188.104,6	0,340888	Rp 1.186.688.888,0	Rp 3.781.901.688,07	0,312888	Rp 1.288.888.888,0	Rp 3.781.888.888,0	0,348888	Rp 1.288.888.888,0	Rp 3.981.288.888,0	0,328888
slaves bar	Rp 278.688.128,88	Rp 1.702.888.888,0	0,164288	Rp 288.888.888,8	Rp 2.122.368.211,78	0,138888	Rp 311.488.888,0	Rp 1.688.888.888,0	0,188888	Rp 367.888.888,0	Rp 2.081.888.888,0	0,178888
slaves tengah	Rp 981.088.888,8	Rp 3.178.888.888,8	0,308888	Rp 988.288.888,8	Rp 3.688.888.888,8	0,268888	Rp 1.068.888.888,8	Rp 3.888.888.888,8	0,278888	Rp 1.088.888.888,8	Rp 4.128.888.888,8	0,268888
slaves tenggara	Rp 788.888.888,8	Rp 2.888.401.888,2	0,278888	Rp 888.288.888,8	Rp 4.188.888.888,8	0,218888	Rp 988.888.888,8	Rp 3.911.688.888,8	0,258888	Rp 1.188.488.888,8	Rp 4.188.888.888,8	0,288888
slaves selatan	Rp 348.888.188,04	Rp 7.188.888.888,2	0,488888	Rp 368.888.888,8	Rp 9.088.888.888,8	0,418888	Rp 398.888.888,8	Rp 9.288.288.888,8	0,438888	Rp 4.188.888.888,8	Rp 9.588.888.888,8	0,438888
gortalo	Rp 311.288.011,411	Rp 1.581.088.888,2	0,198888	Rp 388.288.888,8	Rp 1.788.088.888,8	0,218888	Rp 384.488.888,8	Rp 1.881.211.288,8	0,218888	Rp 488.488.888,8	Rp 1.981.088.888,8	0,248888
kaimatanutaa	Rp 507.888.888,2	Rp 2.388.188.888,8	0,218888	Rp 488.888.888,8	Rp 2.888.888.888,8	0,168888	Rp 588.888.888,8	Rp 2.488.888.888,8	0,248888	Rp 688.888.888,8	Rp 2.688.088.888,8	0,258888
kaimatanbar	Rp 1.681.888.888,8	Rp 4.484.488.888,8	0,378888	Rp 1.988.888.888,8	Rp 5.888.888.888,8	0,348888	Rp 2.188.888.888,8	Rp 5.688.888.888,8	0,388888	Rp 2.311.888.888,8	Rp 5.988.888.888,8	0,388888
kaimatanengah	Rp 1.188.888.888,8	Rp 3.988.888.888,8	0,308888	Rp 1.388.888.888,8	Rp 4.088.488.888,8	0,338888	Rp 1.688.888.888,8	Rp 4.688.888.888,8	0,368888	Rp 1.788.888.888,8	Rp 4.988.888.888,8	0,368888
kaimatan selatan	Rp 2.800.788.888,8	Rp 5.288.888.888,8	0,498888	Rp 2.881.888.888,8	Rp 5.888.888.888,8	0,508888	Rp 3.588.888.888,8	Rp 6.588.888.888,8	0,538888	Rp 3.888.888.888,8	Rp 6.788.888.888,8	0,568888
kaimatan timur	Rp 4.088.888.888,8	Rp 7.988.888.888,8	0,518888	Rp 4.588.888.888,8	Rp 8.188.888.888,8	0,568888	Rp 5.888.888.888,8	Rp 10.688.888.888,8	0,558888	Rp 6.588.888.888,8	Rp 11.788.888.888,8	0,568888
maluku	Rp 488.288.888,8	Rp 2.988.888.888,8	0,168888	Rp 488.888.888,8	Rp 2.688.088.888,8	0,188888	Rp 488.788.888,8	Rp 3.088.888.888,8	0,168888	Rp 488.888.888,8	Rp 3.288.888.888,8	0,152888
maluku utaa	Rp 201.888.888,8	Rp 2.022.888.888,8	0,108888	Rp 328.888.888,8	Rp 2.278.888.888,8	0,148888	Rp 388.888.888,8	Rp 2.488.088.888,8	0,158888	Rp 488.888.888,8	Rp 2.688.888.888,8	0,188888
papubast	Rp 388.111.888,8	Rp 6.708.888.888,8	0,008888	Rp 400.088.888,8	Rp 7.088.888.888,8	0,068888	Rp 488.288.888,8	Rp 7.388.888.888,8	0,068888	Rp 488.888.888,8	Rp 11.388.888.888,8	0,048888
Papua	Rp 1.088.888.888,8	Rp 12.588.888.888,8	0,008888	Rp 1.088.888.888,8	Rp 13.088.888.888,8	0,008888	Rp 1.088.888.888,8	Rp 13.488.888.888,8	0,008888	Rp 2.088.888.888,8	Rp 15.288.888.888,8	0,138888

## LAMPIRAN 6

### Rasio Kemandirian

provinsi	2016			2017			2018			2019		
	RAD	partisipatif	RFOND	RAD	partisipatif	RFOND	RAD	partisipatif	RFOND	RAD	partisipatif	RFOND
aah	Rp 2.001.109.455,1	Rp 10.289.718.811,94	0,21023027	Rp 2.276.325.588,813	Rp 12.008.017.278,818	0,1884989	Rp 2.339.335.389,646	Rp 12.055.911.822,555	0,19564153	Rp 2.688.912.471,148	Rp 13.049.675.124,487	0,21881083
sumbatak	Rp 4.584.888.100,88	Rp 5.289.407,09	0,92178938	Rp 5.287.484.411,500	Rp 6.928.134.939,913	0,76387599	Rp 5.639.940.539,448	Rp 7.055.134.423,265	0,79970488	Rp 5.761.270.421,051	Rp 7.300.647.938,241	0,78814619
sumrabat	Rp 1.964.148.975,38	Rp 2.688.608.271,110	0,73107616	Rp 2.134.010.589,503	Rp 3.918.734.921,982	0,54463204	Rp 2.275.081.088,536	Rp 4.012.034.210,887	0,56849153	Rp 2.338.482.878,865	Rp 4.046.878.368,486	0,57858166
ria	Rp 3.110.651.293,78	Rp 3.829.481.738,335	0,812291677	Rp 3.360.028.975,199	Rp 4.538.335.717,184	0,74191070	Rp 3.638.935.740,121	Rp 4.835.928.284,846	0,75288875	Rp 3.558.210.956,339	Rp 5.144.630.024,820	0,69319405
kepulauan	Rp 1.078.338.241,98	Rp 1.612.088.029,646	0,66821001	Rp 1.047.788.614,304	Rp 2.135.288.926,862	0,5072259	Rp 1.220.788.246,946	Rp 2.278.002.977,357	0,53689404	Rp 1.311.704.951,178	Rp 2.626.462.688,205	0,49848898
jaroh	Rp 1.238.514.464,019	Rp 2.188.786.038,464	0,56593328	Rp 1.580.304.857,342	Rp 2.728.280.938,930	0,58029803	Rp 1.685.338.937,282	Rp 2.734.945.957,999	0,61488324	Rp 1.681.089.944,335	Rp 2.922.484.935,411	0,57498101
sumrabatan	Rp 2.546.175.944,948	Rp 4.022.144.075,918	0,63304608	Rp 3.081.638.634,308	Rp 4.061.113.371,546	0,76002076	Rp 3.528.000.712,188	Rp 5.577.675.004,444	0,62923048	Rp 3.484.510.853,231	Rp 5.785.176.477,582	0,60341168
bangkaling	Rp 574.238.443,889	Rp 1.375.011.313,345	0,41742101	Rp 788.821,81	Rp 1.538.930.002,512	0,00481294	Rp 850.441.748,81	Rp 1.684.218.739,248	0,50188320	Rp 836.711.056,332	Rp 1.767.819.335,889	0,46781244
bangulu	Rp 781.557.940,8	Rp 1.618.952.188,848	0,48381101	Rp 804.575.889,594	Rp 1.997.884.640,748	0,40273365	Rp 822.257.893,935	Rp 1.978.482.546,231	0,41487208	Rp 826.678.986,048	Rp 2.105.267.075,344	0,39248948
lampung	Rp 2.388.765.251,247	Rp 3.288.500.044,588	0,73057018	Rp 2.730.556.488,334	Rp 2.688.010.088,881	1,000594	Rp 2.824.255.787,078	Rp 2.882.047.948,288	1,01136572	Rp 3.018.652.291,189	Rp 2.674.688.670,888	1,12948888
KI Jakarta	Rp 36.888.017,587	Rp 15.711.661.482,714	0,00245458	Rp 48.901.488.817,748	Rp 18.988.291.388,929	2,58487018	Rp 48.327.135.470,811	Rp 1.785.177.072,934	2,48885728	Rp 45.717.400.038,802	Rp 14.591.571.331,179	3,14010388
jabar	Rp 17.042.886.113,672	Rp 10.627.674.448,888	1,60638988	Rp 18.081.128.738,824	Rp 13.965.286.640,884	1,2849814	Rp 19.642.315.488,788	Rp 14.241.780.488,994	1,3884988	Rp 21.244.268.810,177	Rp 14.753.981.848,688	1,48881101
barah	Rp 5.483.156.784,881	Rp 3.185.558.940,789	1,7488868	Rp 5.766.371.324,247	Rp 3.930.029.933,372	1,46404878	Rp 6.329.138.294,646	Rp 3.978.288.485,955	1,59389501	Rp 7.022.389.166,628	Rp 4.165.931.811,835	1,68886278
javatengah	Rp 11.541.028.720,338	Rp 8.052.244.811,988	1,4625888	Rp 12.547.513,388	Rp 11.117.994.480,88	0,0112857	Rp 13.711.886.088,848	Rp 10.988.484.152,788	1,2101338	Rp 14.487.942.286,388	Rp 11.388.681.911,588	1,28881018
DY	Rp 1.678.748.196,521	Rp 2.255.905.071,176	0,75884028	Rp 1.881.978.386,085	Rp 3.218.738.956,882	0,588848	Rp 2.040.728.348,520	Rp 3.338.788.888,982	0,61318572	Rp 2.038.788.384,848	Rp 3.808.013.485,035	0,57888888
javatimur	Rp 15.817.786.024,736	Rp 9.111.388.472,466	1,73888777	Rp 17.324.177.684,224	Rp 12.981.546.688,888	1,33882528	Rp 18.981.082.012,828	Rp 13.338.488.388,272	1,3880288	Rp 19.327.175.485,466	Rp 14.015.982.687,984	1,38881018
bali	Rp 3.041.156.238,466	Rp 2.202.932.485,789	1,38162101	Rp 3.388.472.288,305	Rp 2.578.094.888,881	1,3880438	Rp 3.788.488.688,346	Rp 2.556.488.930,047	1,4888801	Rp 4.028.156.314,134	Rp 2.616.488.278,085	1,5381018
NB	Rp 1.388.840.194,487	Rp 2.588.038.588,935	0,5288848	Rp 1.684.488.788,994	Rp 3.322.321.615,335	0,5070154	Rp 1.680.477.037,372	Rp 3.270.925.200,000	0,51762888	Rp 1.817.482.788,888	Rp 3.388.818.528,675	0,54884888
NT	Rp 885.166.120,932	Rp 2.888.657.788,567	0,3104888	Rp 1.047.481.557,026	Rp 3.648.882.882,110	0,2888075	Rp 4.888.882,975	Rp 3.680.327.666,180	0,01318637	Rp 1.288.888.388,288	Rp 4.067.582.844,488	0,3184818
slawesi utara	Rp 981.048.980,7	Rp 1.888.881.980,789	0,5188627	Rp 1.146.674.827,814	Rp 2.578.881.388,188	0,4488148	Rp 1.288.884.978,836	Rp 2.525.96.784,465	0,4888448	Rp 1.288.088.345,575	Rp 2.638.411.488,085	0,4888824
slawesi barat	Rp 277.681.268,1	Rp 1.480.115.848,0	0,1908678	Rp 296.985.188,465	Rp 1.532.367.615,917	0,198784	Rp 311.488.881,74	Rp 1.515.780.142,8	0,1988888	Rp 365.288.400,4	Rp 1.688.130.947,611	0,21881018
slawesi tengah	Rp 988.082.039,082	Rp 2.255.604.501,198	0,4388888	Rp 988.212.011,717	Rp 2.634.741.314,195	0,3694884	Rp 1.016.638.888,677	Rp 2.731.480.188,822	0,3728647	Rp 1.030.884.785,077	Rp 3.014.986.810,087	0,33881018
slawesi tenggara	Rp 788.682.544,8	Rp 2.011.484.944,566	0,38881018	Rp 806.288.888,888	Rp 2.718.731.740,788	0,2988255	Rp 938.948.010,785	Rp 2.881.613.400,981	0,3388888	Rp 1.128.441.978,982	Rp 2.940.156.138,377	0,3881018
slawesi selatan	Rp 3.448.531.308,104	Rp 3.704.816.676,661	0,9311078	Rp 3.679.038.948,914	Rp 5.362.077.388,022	0,6888802	Rp 3.948.348.282,428	Rp 5.285.918.278,887	0,74811018	Rp 4.138.681.215,914	Rp 5.417.62.582,582	0,7681018
gontalo	Rp 311.282.024,1	Rp 1.722.296.488,884	0,2488888	Rp 348.267.888,013	Rp 1.404.264.276,957	0,2488888	Rp 348.485.382,42	Rp 1.485.182.194,957	0,2488888	Rp 488.477.811,388	Rp 1.505.488.388,824	0,3281018
kalinantan utara	Rp 507.935.516,972	Rp 1.688.488.210,000	0,3031018	Rp 482.748.888,085	Rp 1.822.477.781,000	0,2688888	Rp 524.088.357,888	Rp 1.882.088.000,000	0,31018652	Rp 658.846.262,222	Rp 1.958.288.844,101	0,33881018
kalinantan barat	Rp 1.684.388.981,978	Rp 2.825.315.938,338	0,5888888	Rp 1.945.647.317,455	Rp 3.442.225.982,152	0,5688240	Rp 2.194.887.882,880	Rp 3.482.881.888,880	0,63888101	Rp 2.311.368.978,81	Rp 3.635.394.246,312	0,63881018
kalinantan tengah	Rp 1.188.388.981,014	Rp 1.888.775.212,265	0,6188888	Rp 1.342.388.688,784	Rp 2.588.485.484,988	0,5188888	Rp 1.616.511.880,277	Rp 3.087.982.318,222	0,5211018	Rp 1.76.781.982,788	Rp 3.191.215.288,485	0,5681018
kalinantan selatan	Rp 2.510.788.678,788	Rp 2.882.348.251,311	0,8804888	Rp 2.841.881.516,568	Rp 2.719.738.980,644	1,0481018	Rp 3.557.316.688,888	Rp 2.988.488.781,688	1,1888888	Rp 3.488.888.788,488	Rp 3.200.688.162,957	1,0881018
kalinantan timur	Rp 402.388.888,888	Rp 3.946.638.388,388	0,10186401	Rp 4.588.731.774,888	Rp 3.555.588.178,888	1,2888888	Rp 5.800.200.288,316	Rp 4.888.781.766,447	1,1881018	Rp 6.955.888.058,488	Rp 5.204.311.510,782	1,28881018
maluku	Rp 485.288.198,074	Rp 2.081.108.016,575	0,2340888	Rp 408.885.041,128	Rp 2.378.629.913,582	0,1821888	Rp 485.778.744,311	Rp 2.618.538.888,888	0,1888888	Rp 488.788.888,085	Rp 2.622.546.724,024	0,18881018
maluku utara	Rp 281.151.113,942	Rp 1.722.888.882,616	0,1621888	Rp 327.488.730,488	Rp 1.880.411.594,555	0,1744888	Rp 338.325.388,316	Rp 2.110.780.688,346	0,1607888	Rp 488.488.388,488	Rp 2.214.288.885,688	0,15881018
papua barat	Rp 388.811.108,288	Rp 6.411.578.811,311	0,0592607	Rp 400.072.402,934	Rp 6.587.918.344,934	0,0618888	Rp 488.248.088,934	Rp 6.880.956.124,081	0,0518888	Rp 488.788.888,788	Rp 10.855.310.294	0,04681018
papua	Rp 1.018.738.128,675	Rp 11.548.875.582,914	0,0888888	Rp 1.015.781.088,675	Rp 11.985.78.444,952	0,0844888	Rp 1.010.372.165,911	Rp 12.485.084.584,888	0,0848888	Rp 2.027.688.485,336	Rp 13.190.02.477,324	0,15881018

## LAMPIRAN 7

### Hasil Uji Statistik SSPS

#### Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
OPINI AUDIT	136	2	3	5	4.90	.444	.197
TINGKAT PENYIMPANGAN	136	.3636	.00002	.3636	.014824	.0534440	.003
KEKAYAAN PEMERINTAH	136	.7334	.0002	.7337	.345267	.1680362	.028
RASIO KEMANDIRIAN	136	3.1406	.0005	3.1411	.691165	.5485026	.301
TINGKAT PENGUNGKAPAN	136	.4118	.5588	.9706	.811851	.0927515	.009
Valid N (listwise)	136						



#### Correlations

		OPINI AUDIT	TINGKAT PENYIMPANGA N	KEKAYAAN PEMERINTAH	RASIO KEMANDIRIAN	TINGKAT PENGUNGKAPA N
OPINI AUDIT	Pearson Correlation	1	-.132	.197*	.025	.066
	Sig. (2-tailed)		.126	.022	.774	.446
	N	136	136	136	136	136
TINGKAT PENYIMPANGAN	Pearson Correlation	-.132	1	-.077	-.100	-.155
	Sig. (2-tailed)	.126		.375	.245	.072
	N	136	136	136	136	136
KEKAYAAN PEMERINTAH	Pearson Correlation	.197*	-.077	1	.833**	.086
	Sig. (2-tailed)	.022	.375		.000	.321
	N	136	136	136	136	136
RASIO KEMANDIRIAN	Pearson Correlation	.025	-.100	.833**	1	.174*
	Sig. (2-tailed)	.774	.245	.000		.042
	N	136	136	136	136	136
TINGKAT PENGUNGKAPAN	Pearson Correlation	.066	-.155	.086	.174*	1
	Sig. (2-tailed)	.446	.072	.321	.042	
	N	136	136	136	136	136

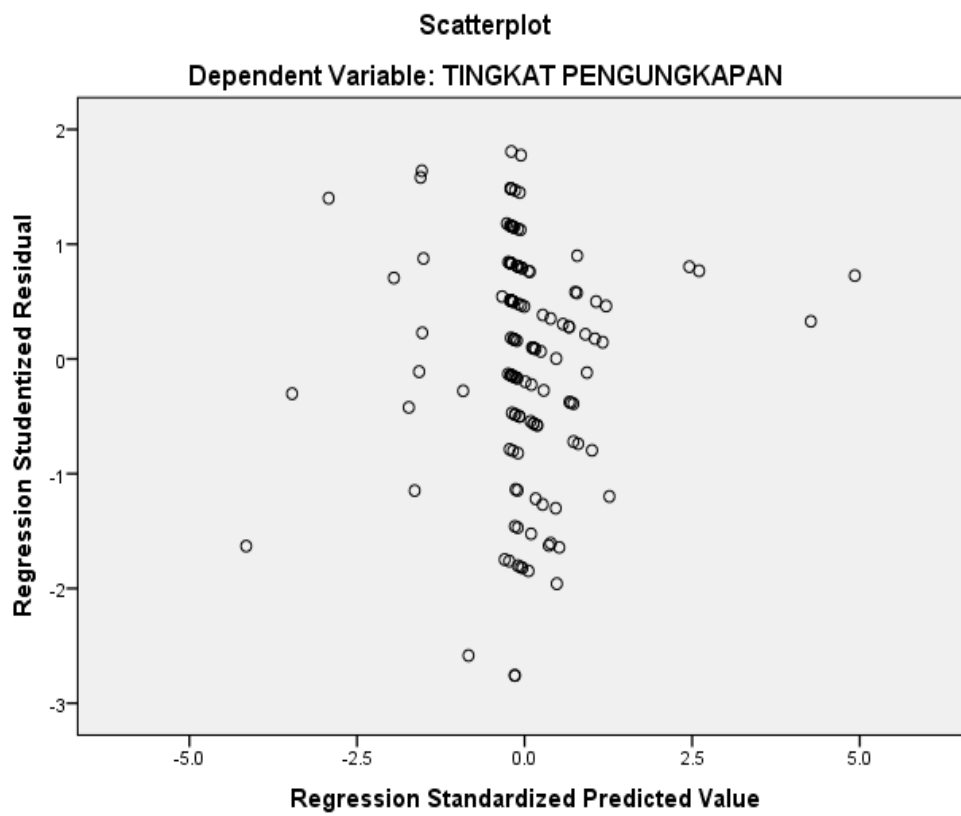
\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	N	136
	Mean Std. Deviation	.0000000 .08957206
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.048

	Negative	-0.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.039 <sup>c</sup>



Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	.729	.090		8.140	.000
	OPINI AUDIT	.018	.019	.088	.979	.329
	TINGKAT PENYIMPANGAN	-.217	.149	-.125	-1.462	.146
	KEKAYAAN PEMERINTAH	-.134	.089	-.242	-1.503	.135
	RASIO KEMANDIRIAN	.061	.027	.361	2.278	.024

a. Dependent Variable: TINGKAT PENGUNGKAPAN

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.729	.090		8.140	.000		
	OPINI AUDIT	.018	.019	.088	.979	.329	.880	1.136
	TINGKAT PENYIMPANGAN	-.217	.149	-.125	-1.462	.146	.970	1.031
	KEKAYAAN PEMERINTAH	-.134	.089	-.242	-1.503	.135	.274	3.645
	RASIO KEMANDIRIAN	.061	.027	.361	2.278	.024	.283	3.530

a. Dependent Variable: TINGKAT PENGUNGKAPAN

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.260 <sup>a</sup>	.067	.039	.0909293	1.947

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.260 <sup>a</sup>	.067	.039	.0909293
---	-------------------	------	------	----------

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.078	4	.020	2.366	.050 <sup>b</sup>
	Residual	1.083	131	.008		
	Total	1.161	135			

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.729	.090		8.140	.000
	OPINI AUDIT	.018	.019	.088	.979	.329
	TINGKAT PENYIMPANGAN	-.217	.149	-.125	-1.462	.146
	KEKAYAAN PEMERINTAH	-.134	.089	-.242	-1.503	.135
	RASIO KEMANDIRIAN	.061	.027	.361	2.278	.024

a. Dependent Variable: TINGKAT PENGUNGKAPAN

